

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**MENANGGULANGI BERKEMBANGNYA TERORISME DI INDONESIA DAN
AUSTRALIA MELALUI KERJASAMA ANTARA DUA NEGARA**

Oleh:

RODNEY GRIFFITHS
NOMOR PESERTA: 069

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LX
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX tahun 2020, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “Menanggulangi Berkembangnya Terorisme di Indonesia dan Australia Melalui Kerjasama Antara dua Negara.”

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LX tahun 2020 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI. Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI Bapak Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LX di Lemhannas RI Tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Mayjen TNI Rahmat Pribadi dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI. Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas.

Jakarta, Juni 2020

Penulis



Rodney Griffiths CSM, RAN, BA, Bed
KOLONEL LAUT. NRP. 8082



Jakarta, 2020
Deputi Pendidikan
Pimpinan Tingkat Nasional.

Rahmat Pribadi
Mayor Jenderal TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Rodney John Ronald Lindsay Griffiths CSM, RAN, BA (Kajian Asia), BEd

Pangkat: Kolonel (Laut)

Jabatan: Peserta Lemhannas PPRA LX

Instansi : Royal Australian Navy

Alamat : Apartemen 17C, Shangri-La Residence, Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka Saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juni 2020

Penulis Taskap
(Materi Rp 6000)

Rodney Griffiths CSM, RAN, BA, Bed
KOLONEL LAUT. NRP. 8082692

Jakarta, 2020
Deputi Pendidikan
Pimpinan Tingkat Nasional.

Rahmat Pribadi
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| TABEL..... | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 3 |
| 3. Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 4. Ruang Lingkup dan Sistematika..... | 5 |
| 5. Metode dan Pendekatan | 7 |
| 6. Pengertian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 7. Umum..... | 10 |
| 8. Peraturan Perundang-undangan | 11 |
| 9. Kerangka Teoritis | 19 |
| 10. Data dan Fakta..... | 21 |
| 11. Lingkungan Strategis..... | 22 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| 12. Umum..... | 30 |
| 13. Paradigma Nasional Kedua Negara..... | 30 |
| 14. Ancaman Terorisme di Kedua Negara | 34 |
| 15. Mantan ISIS yang akan kembali ke Indonesia dan Australia..... | 44 |
| 16. Terorisme Siber..... | 48 |
| 17. Keamanan Maritim (Maritime Security) | 53 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 18. Kesimpulan | 62 |
| 19. Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 66 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | 72 |
| 1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 72 |
| 2. LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP..... | 73 |
| 3. ALUR PIKIR | 74 |

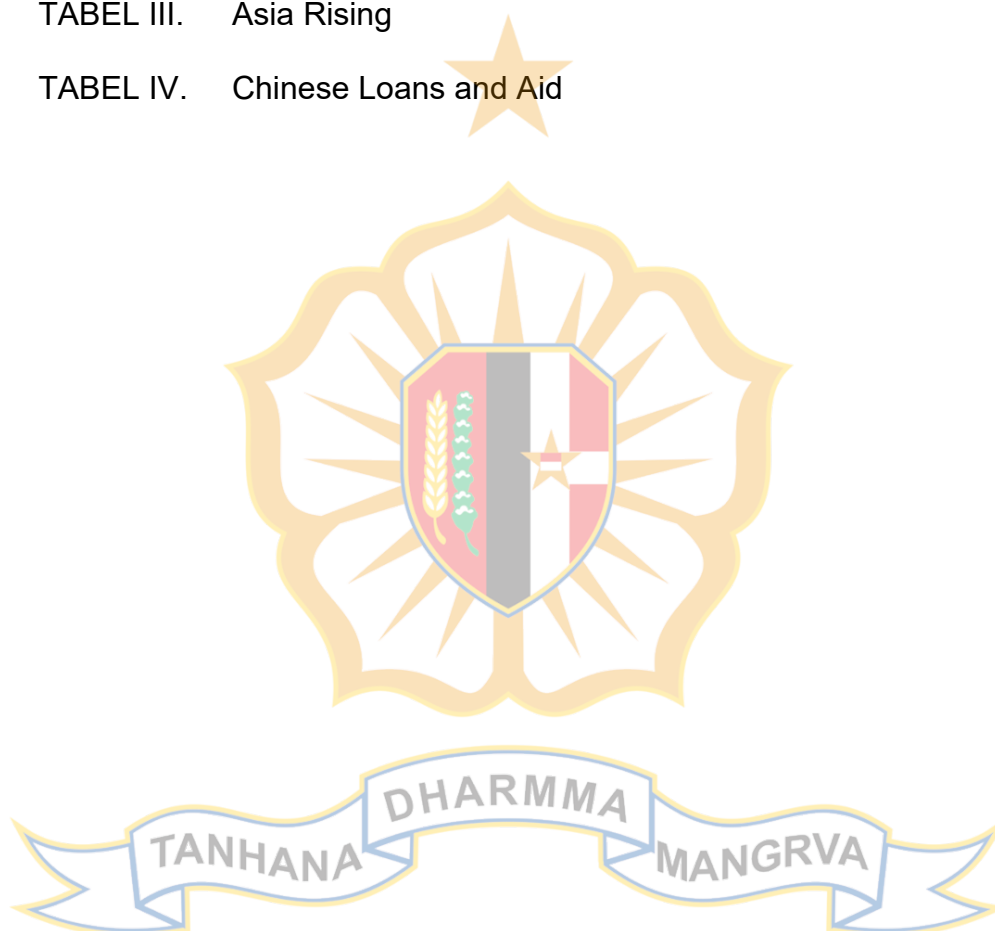
TABEL

TABEL I. Deaths from Terrorism 2007 -2017

TABEL II. South Pacific Region Expenditure, 2004-05 to 2006-07

TABEL III. Asia Rising

TABEL IV. Chinese Loans and Aid



DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1. Bendera Australia masih berkibar sebelah luar Kedutaan Besar Australia sesudah tindakan terorisme itu
- GAMBAR 2. Pasukan Kopasus di pawai (Foto SriPo)
- GAMBAR 3. Klaim Sepihak China di Laut Natuna

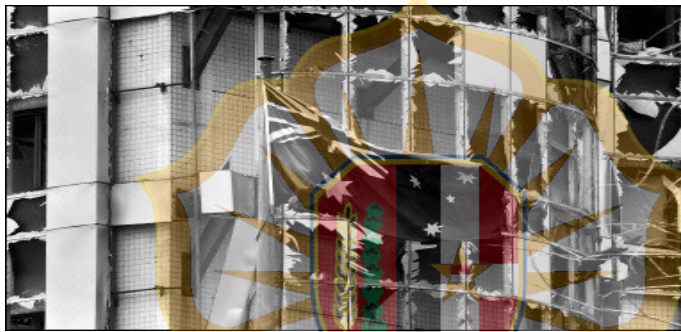


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindakan terorisme di Bali pada tahun 2002, dan didepan Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004, sejak dua kejadian itu merupakan tanda kuat bahwa aparat keamanan kedua negara ini, yaitu Australia dan Indonesia, harus bekerjasama lebih erat daripada sebelumnya. Tindakan tersebut mengakibatkan 49 warga negara Indonesia dan 88 warga negara Australia meninggal dunia dan lebih dari 300 ratus orang lain terluka.



Gambar 1. Bendera Australia masih berkibar sebelah luar Kedutaan Besar Australia sesudah tindakan terorisme itu (Foto AFP)

Sejak saat itu Indonesia berperang Melawan Terorisme. Indonesia harus menghadapi terorisme, pertama di pulau Bali, kedua di Hotel JW Marriott Jakarta dan pada tahun 2004 di Jl. H.R. Rasuna Said di kawasan Kuningan. Pemerintah Indonesia sudah tahu bahwa ada masalah dengan para teroris aktif di negaranya dan saat ini merupakan waktu yang penting untuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara yang berdekatan, termasuk Australia.



Gambar 2. Pasukan Kopasus di pawai (Foto SriPo)

Pemerintah dari dua negara, yaitu Indonesia dan Australia, menyadari bahwa kalau kita mau mengatasi terorisme di kedua negara apalagi seluruh Asia Tenggara, kemudian kita harus bekerjasama dengan dekat. Sebenarnya pemimpin dari kedua negara sudah membicarakan masalah ini. Pada saat Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke Australia pada tanggal 10 Februari tahun 2020, kedua pemimpin membicarakan bahwa negara sudah bekerjasama di bidang, keadilan, hukuman dan keamanan. Kedua pemimpin juga membicarakan “keperluan terhadap mengatasi ekstrimis yang keras, dan berkomitmen untuk bekerjasama untuk mencegah radikalisasi, menentang propaganda ekstremis dan mempertahankan masyarakat yang kuat, kohesif, dan multikultural dan multi-agama.”¹ Selain itu, kedua pemimpin membicarakan kepentingan dua lembaga yaitu; Indonesia-Australia Ministerial Council on Law and Security, and the Indonesia-Australia Counter Terrorism Consultation. Kedua lembaga ini penting untuk menghadapi ancaman terorisme, kejahatan transnasional dan keamanan siber. Dan catatan penting, kedua pemimpin mengetahui bahwa “Pertemuan Sub-Regional yang dibentuk pada tahun 2017, yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Australia sebagai mekanisme regional untuk secara kolektif menanggapi terhadap ancaman keamanan para mantan ISIS.”²

Dua agen senior yang bertanggung jawab untuk mengalahkan terorisme di Indonesia dan Australia adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Department of Attorney General masing-masing. Dibawah dua aparat senior ini berada Badan Intelijen Negara (BIN) yang berpasang dengan Australian Secret Intelligence Service (ASIS), Indonesian National Police (Polri) yang berpasang dengan Australian Federal Police (AFP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpasangan dengan Australian Defence Force (ADF).

Sumber utama terorisme di kawasan Asia Tenggara pada saat ini adalah, Islamic State Irak dan Suriah (ISIS), Hizbut-Tahrir Indonesia, Jemaah Islamiyah (JI) dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan beberapa kelompok kecil lainnya. Tentu saja ISIS, seperti yang telah dilakukan di banyak bagian Timur Tengah, sekarang menyusup ke Indonesia dan telah mengklaim bertanggung jawab

¹Pengucapan dari Kantor Perdana Menteri Australia pada tanggal 11 Feb 2020, pm.gov.au/media/joint-statement-0, diakses pada tanggal 19 April 2020.

²Pengucapan dari Kantor Perdana Menteri Australia pada tanggal 11 Feb 2020, pm.gov.au/media/joint-statement-0, diakses pada tanggal 19 April 2020.

atas serangan teror di Jakarta pada Januari 2016. Sumber utama keprihatinan bagi pemerintah Indonesia dan Australia juga terkait dengan ISIS adalah mantan ISIS yang mau kembali ke Indonesia dan Australia dari Suriah.

Makalah ini memiliki fokus besar pada masalah ini karena memiliki potensi untuk secara signifikan membentuk pandangan terorisme di Asia Tenggara. Ada banyak perdebatan dalam beberapa bulan terakhir mengenai masalah ini dengan pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima warga negara Indonesia ini yang telah terlibat dalam perang di Timur Tengah melalui perjuangan untuk ISIS. Seperti yang dinyatakan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin setelah pertemuan dengan para menteri kabinet di Istana Bogor: "Pemerintah dan negara harus memastikan bahwa 267 juta orang di Indonesia aman dari ancaman terorisme. Jika para pejuang teroris asing ini kembali, mereka bisa menjadi virus teroris baru yang mengancam 267 juta orang itu."³

2. Rumusan Masalah

Kata "Teror" adalah sesuatu yang dapat dikenakan atas personil pemerintah seperti halnya terhadap para aktor individu. Selanjutnya, peribahasa, yang sering dikutip "seorang teroris dapat menjadi seorang pejuang kebebasan bagi manusia yang lain". Jadi untuk rumusan masalah ini kita harus memastikan bahwa untuk Australia dan Indonesia, terorisme artinya aktor yang ingin menghancurkan sistem demokrasi di negara melalui kekerasan yang tidak sah.

Tujuan untuk Taskap ini berdasarkan atas pertanyaan, "Bagaimana menanggulangi berkembangnya terorisme di Indonesia dan Australia melalui kerja sama kedua negara?". Masalah ini harus dihadapi melalui kerjasama yang erat diantara semua aparat, untuk Taskap ini aparat Indonesia dan Australia. Kita telah menetapkan banyak undang-undang untuk mengatasi masalah ini, tetapi seperti yang kita lihat dari masalah besar saat ini untuk mengembalikan para mantan ISIS di masa depan kita harus tetap waspada dan bersiap untuk bekerjasama untuk mengatasi ini dan semua masalah lain yang pasti akan muncul di tahun mendatang. Taskap ini akan menggambarkan masalah dan

³ Wakil Presiden Ma'ruf Amin sesudah pertemuan di Bogor, Artikel Jakarta Post, tanggal 12 Feb 2010, hal 2.

menyampaikan analisis yang terlibat dalam menghadapi masalah ini dan beberapa isu penting yang lain.

Oleh karena itu tugas yang dihadapi oleh kedua negara kita adalah untuk memastikan bahwa di kedua negara ada hukum dan institusi yang kuat dan mampu mengatasi masalah tersebut. Indonesia dan Australia di masa lalu dan saat ini bekerjasama untuk mengatasi terorisme. Taskap ini akan menganalisis empat isu utama, yaitu;

- a. Terorisme di Kedua Negara – fokus dalam bagian ini adalah ancaman umum dan kebijakan dan kerangka polisi/militer yang terkait dengan menghadapi terorisme umum di kedua negara. Ini adalah masalah mendasar yang kita hadapi. Kita harus memastikan bahwa lembaga dan pengaturan kebijakan legislatif di kedua negara sama-sama optimal,
- b. Mantan ISIS yang akan kembali ke Indonesia dan Australia - masalah ini adalah nomor satu di kedua negara. Mantan ISIS menimbulkan ancaman signifikan terhadap ketertiban di kedua negara karena para pejuang ini telah didoktrinasi dan dilatih dalam berbagai taktik terror terluas. Tidak hanya mereka sendiri merupakan ancaman yang berbahaya, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk melatih orang lain di kedua negara,
- c. Terorisme Siber - serangan siber adalah bentuk terorisme yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. “Pandangan digital berubah dengan cepat, dan terorisme Siber sedang meningkat. Pada 2018, ada 2,3 miliar pelanggaran data.”⁴ Baik Indonesia dan Australia harus meningkatkan respons mereka terhadap bentuk terorisme yang sedang berkembang ini, dan
- d. Keamanan Maritim (Maritime Security) - menentang terorisme di daerah maritim sangat penting bagi Indonesia dan Australia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan Australia adalah negara pulau terbesar di dunia. Kita bersama mengandalkan laut untuk keberadaan kita, oleh karena itu menangani masalah ini sangat penting.

⁴<https://blog.suceri.net/2019/10/cost-of-Siber-attacks.html> accessed 23 April 2020

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Dari penulisan Taskap ini adalah untuk menjelaskan situasi antara Australia dan Indonesia berkenaan dengan kerjasama bilateral dalam bidang terorisme. Tujuan taskap ini adalah menyampaikan dan menggambarkan ancaman teroris oleh kelompok mana dan apa yang sudah pemerintah lakukan untuk menghadapi masalah ini. Penulis akan meneliti kelompok teroris yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Australia dan bagaimana kelompok ini akan dipengaruhi oleh kembalinya mantan tentara ISIS (foreign fighters) dari perang di Suriah di pihak ISIS.

b. Tujuan

Tujuannya adalah mengusulkan bagaimana kita bersama akan menghadapi ancaman terorisme dengan fokus yang lebih tajam terhadap kembalinya mantan ISIS (*returning foreign fighters*). Menilai aparat yang sudah ada dan bagaimana aparat bisa mengkaji ulang hal tersebut. Jadi, kedua negara mempunyai peralatan yang sangat berguna dan efisien untuk menghadapi semua masalah yang terkait dengan isu terorisme. Jadi pada akhirnya apa yang menjadi pembahasan dalam Taskap ini adalah, bagaimana menanggulangi berkembangnya terorisme di Indonesia dan Australia melalui kerjasama.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Taskap ini adalah untuk melihat kebijakan yang ada di kedua negara sekarang dan kebijakan apa yang mungkin sesuai untuk masa depan, kemampuan apa yang ada di kedua negara dalam hal dapat mengelola dan mengendalikan masalah ini dari sudut pandang penegakan hukum dan mengidentifikasi peluang untuk bekerja sama, dan terakhir fokus yang berbeda akan ditempatkan pada masalah yang menjengkelkan tentang bagaimana menangani mantan ISIS yang kembali ke kedua negara.

Diakui bahwa Indonesia dan Australia tentu saja merupakan negara berdaulat yang merdeka yang tidak akan selalu menyepakati cara terbaik

untuk mengelola masalah-masalah yang terkait dengan terorisme ini. Jadi oleh karena itu ruang lingkup Taskap ini akan dibatasi oleh apa yang secara praktis dapat dicapai di antara kedua Negara.

b. Sistematika

Tulisan ini menitik beratkan dalam terorisme dan kerjasama di antara Australia dan Indonesia sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah Terorisme, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan, Ruang lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan dan Pengertian yang terkait dengan judul masalah

2) Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan semua naskah dan sumber referensi pokok yang menjadi acuan Taskap ini. Bagian dari penguraian ini akan menjelaskan dalam konteks apa naskah-naskah akan dipakai. Termasuk dalam naskah dan sumber referensi ini adalah kebijakan dari Indonesia dan Australia sebaiknya dari luar negeri kedua negara. Termasuk juga adalah pendekatan militer dari diplomasi yang terkait dengan masalah terorisme. Naskah dan sumber referensi juga akan menghadapi teori apa yang terkait dengan isu-isu, misalnya teori terorisme umum, teori strategis dan teori geopolitik.

3) Bab III Pembahasan

Bab ini adalah sangat penting karena di dalamnya terkandung inti dari rumusan masalah. Termasuk dalam bab ini latar belakang atau sejarah diantara negara terkait dalam bidang kerjasama umum dan lebih spesifik dalam bidang terorisme.

Selain sejarah atau latar belakang, bab ini akan mengkaji ancaman umum, kebijakan dan kerangka polisi/militer yang dimiliki oleh kedua negara dan peluang untuk “bench marking”. Hal ini dipertimbangkan sangat penting oleh penulis untuk menghadapi hot isu pada saat ini yaitu, mantan ISIS. Terorisme Siber dan dampak terhadap kedua negara dalam bidang kontra terorisme. Dan akhirnya, keamanan maritim terkait dengan kontra terorisme.

4) Bab IV Penutup

Bab ini menyampaikan kesimpulan dan juga memberi usulan untuk menanggulangi berkembangnya terorisme di Indonesia dan Australia melalui bekerjasama diantara dua negara.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap Perorangan ini adalah induktif metode dengan pendekatan kepustakaan yang terkait. Adapun pendekatan dilakukan secara deskriptif analitik yaitu menyelidiki ancaman terorisme.

b. Pendekatan

Penyusunan Taskap ini menggunakan metode deskriptif analitis, yakni menyajikan dan membahas data maupun informasi dari perspektif strategi nasional dan internasional.

6. Pengertian

- a. **FONOPS** – Freedom of Navigation Operations – Ini operasi yang dijalankan oleh kapal perang yang mau menegaskan kebebasan perjalanan di daerah “heigh Seas” di dunia.
- b. **MWV** – Kapal Perang yang Kecil (Minor War Vessel) – pada umumnya kapal ini adalah kapal patrol atau kapal ranjau.
- c. **MFU** – Kapal Perang yang Besar (Major Fleet Unit) – kapal perang ini memasukkan kapal induk, kapal penjelajah dan kapal perusak.
- d. **MDA** -- Kesadaran Domain Maritim (MDA) - (Maritime Domain Awareness) didefinisikan oleh Organisasi Maritim Internasional sebagai pemahaman yang efektif tentang apa pun yang terkait dengan domain maritim yang dapat berdampak pada keamanan, keselamatan, ekonomi, atau lingkungan.
- e. **Penegakan** - Berbagai tugas yang harus dilakukan oleh Angkatan Laut dalam peran kepolisian berkisar dari Operasi Maritim Intensitas Rendah (LIMO) hingga menjaga ketertiban di laut. Ini lebih lanjut

mencakup aspek-aspek keamanan pesisir, sebagai bagian dari tanggungjawab maritim Angkatan Laut.

- f. **Department of the Attorney General** (Departemen Kejaksaan Agung) – Ini departemen pemerintah yang mirip Menkopolkam di Indonesia.
- g. **Common Law** – Ini istilah yang menggambarkan hukum yang dipakai oleh pengadilan di Australia didasarkan atas preseden.
- h. **Terorisme** - “Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam mengejar tujuan politik, agama, ideologis atau social.”⁵
- i. **Al Qaeda** - organisasi teror yang Islam fundamentalis.
- j. **Special Air Service** - Rombongan prajurit yang paling khusus di Tentara Nasional Australia (Komando).
- k. **Free Trade Agreement** - persetujuan di antara dua negeri tentang perdagangan.
- l. **War against terror** - “perang” terhadap teror di dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
- m. **al-Hawl** – Ini tempat dimana sisa dari pejuang ISIS terjebak. Banyak isteri dan anak dari pejuang ISIS masih tunggu repatriasi ke negara-negara masing-masing.
- n. **Lindt Café Siege** – Ini aksi terorisme yang terkenal di Australia. Sesudah serangan ini pemerintah Australia mendirikan undang-undang baru terkait dengan terorisme.
- o. **Blue Water Navy** – Ini istilah khusus untuk Angkatan Laut yang maju dan mempunyai kapabilitas berlayar kemana saja di seluruh dunia.
- p. **MOWG** – Maritime Operations Working Group – Ini kelompok yang dibentuk oleh Higher Level Committee khusus untuk menangani isu terkait dengan Angkatan Laut di Indonesia dan Australia.
- q. **CN** – Kasal Australia (Chief of Navy)

⁵ <https://www.google.com/search?q=the+meaning+of+the+word+terrorism&oq=the+meaning+of+the+word+terrorism&aqs=chrome..69i57j0l7.9517j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
diakses 5 April 2020.

- r. **CVE** – Countering Violent Extremism – Program-program yang dirancang khusus untuk menghadapi pikiran kekerasan dan fundamentalis oleh pejuang teroris.
- s. **ASD** – Australian Signals Directorate - Agensi yang bertanggung jawab untuk menangani ancaman siber di Australia
- t. **Blue Water Navy** - kekuatan maritim yang mampu melakukan operasi berkelanjutan di perairan dalam samudera terbuka. Blue Water Navy memungkinkan suatu negara memproyeksikan kekuatan jauh dari negara asal dan biasanya mencakup satu atau lebih kapal induk.
- u. **Wash Up** - pertemuan yang diadakan di akhir proyek untuk meringkas dan menyelesaikan masalah yang tersisa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Tinjauan ini akan menggarisbawahi bahwa Indonesia dan Australia memiliki komitmen yang kuat untuk menanggulangi terorisme karena kedua negara telah sangat terpengaruh oleh taktik yang digunakan dalam terorisme, awalnya sebagaimana dirinci di atas dan kemudian diikuti oleh serangkaian serangan lainnya yang konstan.

Taskap ini sangat merekomendasikan agar Indonesia dan Australia bekerjasama secara erat dalam upaya ini, namun penulis sangat menyadari bahwa kedua negara memiliki budaya, sejarah, dan kepercayaan yang sangat berbeda. Juga, harus diingat bahwa kedua negara adalah negara berdaulat dan karenanya akan selalu berfokus pada pengaturan kebijakan apa yang tepat untuk kepentingan negara dan rakyat di kedua negara.

Penulis memilih untuk fokus pada empat bidang utama, yaitu; Ancaman Terorism di Negara, Mantan ISIS yang ingin kembali ke kedua negara, Terorisme Siber dan Terorisme di Domain Maritme. Keempat topik inilah yang dianggap penulis sebagai masalah paling penting yang dihadapi oleh kedua negara. Jadi literatur dan teori yang digunakan dalam Taskap ini akan secara khusus difokuskan pada bidang-bidang ini.

Selanjutnya bab ini juga akan fokus pada lingkungan strategis. Wilayah Asia Pasifik telah mengalami perubahan signifikan selama tujuh puluh tahun terakhir sejak Indonesia pertama kali menjadi negara demokrasi independen. Pada tahun 1945 ketika kemerdekaan Indonesia pertama kali dinyatakan segera menjadi Presiden pertama, Presiden Sukarno, Perang Dunia II baru saja berakhir dan lingkungan strategisnya sangat berbeda dengan lingkungan yang kita hadapi saat ini dan di masa depan. Pada waktu itu Indonesia lebih mementingkan kemerdekaannya dan menyingkirkan penguasa kolonialnya, Belanda. Pada saat itu, tindakan yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dan pejuang kemerdekaan akan dianggap oleh Belanda sebagai terorisme. Bangsa Indonesia yang lahir dari perjuangan itu adalah demokrasi moderat yang modern yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan ingin hidup dalam

kedamaian dan keadilan. Perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan jelas merupakan alasan yang tepat dan adil sedangkan ancaman teroris yang dihadapi bangsa saat ini adalah tindakan para penjahat.

Lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara saat ini sangat berbeda dengan 1945. ASEAN telah dibentuk, di mana Indonesia adalah negara terbesar, kebangkitan Cina telah memberikan perubahan besar secara ekonomi dan yang lebih penting untuk Taskap ini, Cina telah berdampak pada lingkungan strategis melalui klaim teritorialnya terkait dengan "sembilan garis putus-putus", para pejuang teroris telah aktif di Marawi di Filipina dan kelompok-kelompok teroris seperti Jema'ah Islamiah sedang mengejar perjuangan brutal mereka yang tidak dapat dibenarkan di seluruh Indonesia.

8. Peraturan Perundang-undangan

Sumber otoritatif untuk semua kebijakan pertahanan dan luar negeri negara-negara adalah buku putih yang diajukan secara berkala. Buku putih ini adalah, "laporan atau panduan resmi yang menginformasikan pembaca secara ringkas tentang masalah kompleks dan menyajikan filosofi badan penerbit tentang masalah tersebut. Ini dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami suatu masalah, memecahkan suatu masalah, atau membuat sebuah keputusan".⁶ Buku putih terbaru terkait dengan urusan pertahanan dan luar negeri di Indonesia adalah Buku Putih Pertahanan 2015, dan di Australia Buku Putih Kebijakan Luar Negeri 2017 dan Buku Putih Pertahanan 2016.

Kedua dokumen ini mengakui pentingnya kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan ini untuk mengatasi masalah, dalam hal ini khususnya terorisme. Buku Putih Pertahanan Indonesia menyatakan, "Indonesia percaya bahwa negara-negara tetangga adalah sahabatnya yang berbagi komitmen untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan ini. Membangun kesamaan adalah faktor penting dalam hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Indonesia menerapkan prinsip perdamaian sebagai prioritas".⁷ Dari sudut pandang Australia, bekerjasama dengan tetangga-tetangganya bahkan

⁶En.wikipedia.org/wiki/White_paper accessed on 25 April 2020

⁷ Republic of Indonesia, 2015 White Paper on Indonesian Defense Policy, Ministry Indonesian defense, November 2015, p. 34.

lebih menjadi prioritas karena ukuran garis pantai Australia dan populasinya yang relatif rendah dan oleh karena itu kecil dalam militer lawan.

Australia dan Indonesia memiliki sejumlah perjanjian, baik dalam ruang kebijakan luar negeri maupun ruang pertahanan.

a. Perjanjian Pertahanan

- 1) Lombok Treaty (Perjanjian antara Australia dan Republik Indonesia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan) - perjanjian Lombok yang diratifikasi pada tahun 2006 oleh Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda pada 13 November 2006 di Mataram dan dirancang sebagai pengganti Perjanjian Keamanan 1995 antara kedua negara.

Inti dari perjanjian tersebut adalah dalam pasal 2 yang menyatakan “Para pihak, konsisten dengan hukum nasional masing-masing dan kewajiban internasional, tidak akan dengan cara apa pun mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan oleh siapa pun atau entitas yang merupakan ancaman bagi stabilitas nasional, kedaulatan atau integritas teritorial dari Pihak lain, termasuk oleh mereka yang yang berusaha menggunakan wilayahnya untuk mendorong atau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk separatisme, di wilayah Pihak lain.”⁸

- 2) Pengaturan Kerjasama Pertahanan - Pengaturan Kerjasama Pertahanan pertama kali diratifikasi pada tahun 2012 oleh Menteri Pertahanan kedua negara; Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro dari Indonesia dan Stephen Smith dari Australia. Perjanjian itu diperbarui oleh kedua pihak pada Februari 2018 ketika Menteri Pertahanan Ryamizard dan Marise Payne setuju untuk melakukannya. Perjanjian tersebut berada di bawah dan mendukung Perjanjian Lombok. Penegasan kembali pengaturan ini mendukung kerjasama yang sedang berlangsung antara kedua militer dan membantu mengamankan wilayah yang lebih stabil. “Pakta tersebut menegaskan kembali kekuatan hubungan yang telah lama terjalin, niat untuk

⁸ The Lombok Treaty 2006, <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation-Article-2>, accessed on 25 April 2020.

memperdalam keterlibatan dalam beberapa dasawarsa terakhir, dan keyakinan yang berkelanjutan pada dasar-dasar hubungan pertahanan bilateral termasuk saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah yang ditopang oleh Perjanjian Lombok.”⁹

- 3) Pemahaman Bersama tentang Keamanan (Perjanjian Lombok) - Pemahaman Bersama tentang Keamanan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perjanjian Lombok. Perjanjian tersebut pada dasarnya mencakup dua poin utama:

- a) Para Pihak tidak akan menggunakan intelijen mereka, termasuk kapasitas pengawasan, atau sumber daya lainnya, dengan cara yang akan membahayakan kepentingan Para Pihak, dan
- b) Para Pihak akan mempromosikan kerjasama intelijen antara lembaga dan lembaga terkait sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing”.¹⁰

- 4) Deklarasi Bersama tentang Kerjasama Maritim - deklarasi ini ditandatangani oleh dua Menteri Luar Negeri, Julie Bishop dan Ibu Retno Marsudi di Sydney pada 26 Februari 2017. Perjanjian ini penting bagi kedua negara karena secara khusus terkait dengan sumber daya terpenting kedua negara. - lautan. Butir 10 perjanjian menyebutkan komitmen untuk penegakan hukum yang kemudian terkait dengan memerangi terorisme. “Untuk membangun kerjasama yang lebih erat antara lembaga penegakan hukum sipil maritim kami melalui berbagi informasi, peningkatan kapasitas dan pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral.”¹¹

b. Kebijakan Luar Negeri

- 1) Kemitraan Strategis Komprehensif - kemitraan ini menggantikan "Kemitraan Komprehensif Antara Australia dan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 4 April 2005. Perjanjian baru memiliki

⁹ Statemant by the Australian Defence Ministry in <https://thedi diplomat.com/2018/02/whats-in-the-new-australia-indonesia-military-pact/> accessed on 25 April 2020

¹⁰ Joint Understanding on Security, <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation> accessed on 25 April 20

¹¹ Article 10 in Australia-Indonesia - Joint Declaration Maritime Cooperation <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-indonesia-joint-declaration-maritime-cooperation.pdf> accessed 25 April 2020

kepentingan tambahan karena kata "Strategis" kini telah dimasukkan. Ini penting karena kemitraan baru lebih selaras dengan lingkungan strategis kami dan mencakup kegiatan terorisme. Kemitraan ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Scott Morrison pada tanggal 31 Agustus 2018. Ada 5 pilar dalam kemitraan ini, pilar tiga dan empat memiliki makna karena berkaitan dengan keamanan dan kerjasama maritim.

- a) Keamanan - "Kami bertekad untuk bersama-sama menghadapi tantangan bersama dari persaingan serta ancaman terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan kejahatan transnasional. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesiapan untuk mengikuti bencana alam dan dalam menghadapi tantangan tradisional dan baru seperti ancaman siber"¹²
 - b) Keamanan Maritim - "Kami bertekad untuk mengimplementasikan Deklarasi Bersama 2017 tentang Kerjasama Maritim dan Rencana Aksi Kerjasama Maritim 2018 sepenuhnya untuk mewujudkan visi bersama kami tentang domain maritim yang damai, aman dan stabil."¹³
- 2) Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) - perjanjian ini diratifikasi oleh Australia pada bulan November 2019 dan kemudian oleh Indonesia pada bulan Februari 2020. Perjanjian ini adalah perjanjian perdagangan bebas yang telah bertahun-tahun dibuat. Perjanjian tersebut akhirnya memberi dorongan untuk meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Australia. Perdagangan antara kedua negara tidak pernah mencapai potensinya dan harapannya perjanjian ini akan mencapai potensinya.

c. Undang-Undang Terorisme di Indonesia

Pada tahun 2002 undang-undang terorisme sementara disahkan di Indonesia. Undang-undang ini adalah hukum No. 1 tahun 2002 dan

¹² Joint Comprehensive Strategic Partnership, pillar 3, <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia> accessed on 25 April 2020

¹³ Joint Comprehensive Strategic Partnership, pillar 4, <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia> accessed on 25 April 2020

merupakan hukum sementara yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri saat itu. Hukum dikeluarkan segera setelah pemboman Bali.

Undang-undang sementara ini kemudian diperbarui oleh undang-undang No. 15 tahun 2003 yang memberikan definisi yang lebih luas untuk istilah terorisme. Pembaruan undang-undang pada tahun 2003 pada dasarnya memberikan lebih banyak kekuatan kepada penyidik dalam persyaratan pembuktian disesuaikan sehingga laporan intelijen dapat dimasukkan ke dalam bukti ketika tidak ada bukti lain yang cukup dan juga memungkinkan penyadapan telepon untuk mendapatkan informasi sensitif. Undang-undang anti teror ini digunakan untuk menghukum para pelaku “dari Hotel Marriot di Jakarta pada Agustus 2003, Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada September 2004 dan pemboman Bali putaran kedua pada Oktober 2005.”¹⁴

Pada 25 Mei 2018, setelah serangan teror di Surabaya undang-undang terorisme kembali direvisi. Sampai revisi ini, TNI hanya sedikit atau tidak terlibat sama sekali dalam memerangi terorisme di Indonesia. Undang-undang yang direvisi tahun 2018 sekarang mengakui bahwa TNI harus memainkan peran yang lebih aktif dalam memerangi terorisme di Indonesia.

Undang-undang yang direvisi, No 5 tahun 2018 sekarang telah mengklarifikasi peran TNI dalam terorisme itu, “Bagian dari operasi militer, tetapi hanya dapat terlibat setelah permintaan dari polisi dan dengan persetujuan presiden”¹⁵ Undang-undang ini menetapkan bahwa lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola terorisme di Indonesia adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; “Badan yang menangani urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Terorisme Nasional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.¹⁶

Bagi TNI, keterlibatan mereka dalam perang melawan terorisme terdaftar di bawah Operasi Militer Selain Perang (OPSM). Kekhawatiran

¹⁴Law,unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0010/1546327/AntiTerrorismLawandprocessinIndonesia2.pdf accessed on 25 April 2020

¹⁵Aljazeera.com/news/2018/05/Indonesia-passes-controversial-anti-terror-laws-fight-isil-180525055635674.html accessed 26 April 2020

¹⁶Sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175528/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf accessed 26 Apr 2020

utama dengan keterlibatan TNI tampaknya adalah risiko pelanggaran HAM. Untuk mencegah hal ini, direkomendasikan agar sebuah badan independen dibentuk.

Peran TNI dalam hal terorisme dirinci dalam Peraturan Presiden yang diturunkan dari Pasal 7 ayat 2 UU No 34/2004 tentang TNI. Undang-undang ini menyatakan bahwa TNI diizinkan terlibat dalam kegiatan anti terorisme tetapi harus diundang oleh Polri.

d. Undang-Undang Terorisme di Australia

Departemen Kejaksaan Agung dan Departemen Dalam Negeri secara bersama bertanggung jawab atas hukum terorisme di Australia. Departemen Kejaksaan Agung secara langsung bertanggung jawab atas kata-kata dan pengelolaan hukum itu sendiri sedangkan Departemen Dalam Negeri harus terlibat dengan implementasi undang-undang tersebut. Hukum utama yang berkaitan dengan terorisme di Australia tercantum dalam KUHP 1995. Dalam undang-undang ini, "tindakan teroris adalah suatu tindakan, atau ancaman untuk melakukan suatu tindakan, yang dilakukan dengan maksud untuk memaksa atau mempengaruhi masyarakat atau pemerintah manapun dengan intimidasi untuk memajukan tujuan politik, agama atau ideologis".¹⁷

Manajemen sehari-hari yang sebenarnya dari aparat anti terorisme di Australia berada di bawah "Perjanjian Antar-Pemerintah tentang UU CT (kontra terorisme)". Perjanjian ini adalah bagian dari rangkaian perjanjian dan pemahaman di bawah Dewan Pemerintah Australia. Karena Australia adalah federasi, tidak seperti Indonesia, koordinasi ekstra diperlukan antara pemerintah nasional dan negara bagian. Di bawah perjanjian di atas, pemerintah nasional, "akan mempertahankan strategi, kebijakan, dan perundang-undangan terkait terorisme. Pemerintah Australia akan mempertahankan kemampuan anti-terorisme dalam badan-badan nasional".¹⁸

Sebagai bagian dari manajemen terorisme di Australia, ada strategi nasional untuk menangani terorisme (Strategi Anti Terorisme Australia).

¹⁷[Ag.gov.au/NationalSecurity/Counterterrorismlaw/Documents/Australias%20conter%20terrorism%20laws.pdf](https://www.ag.gov.au/NationalSecurity/Counterterrorismlaw/Documents/Australias%20conter%20terrorism%20laws.pdf) accessed on 26 April 2020

¹⁸<https://www.coag.gov.au/sites/default/files/agreements/iga-counter-terrorism.pdf> accessed 26 April 2020

Strategi ini menetapkan kerangka kerja untuk pengaturan anti-terorisme nasional Australia dan memberikan panduan untuk Rencana Anti-Terrorisme Nasional. Kedua dokumen ini menginformasikan manajemen pencegahan dan terjadinya peristiwa teroris. The Counter Terrorism Strategy, "menempatkan ancaman terorisme saat ini dalam konteks global dan mengartikulasikan bagaimana kita menghadapinya".¹⁹

AFP memiliki peran utama dalam mengelola anti terorisme di Australia, namun seperti yang ditunjukkan oleh "Lindt Café Siege" di Sydney pada tahun 2014, undang-undang tentang seruan militer untuk membantu AFP dalam insiden terorisme serius dan rumit. Seperti halnya di Indonesia, pada tahun 2017, pemerintah Australia mengeluarkan undang-undang baru untuk meningkatkan keterlibatan ADF dalam pengelolaan insiden teroris. Undang-undang baru tersebut melibatkan kemampuan ADF untuk merespons "insiden kekerasan yang signifikan" yang mencakup terorisme. ADF terus menjadi responden pertama untuk insiden teroris, namun di bawah Bagian IIIAAA dari Undang-Undang Pertahanan 1903, wewenang untuk meminta keterlibatan oleh ADF kini ada.

e. Undang Undang dan Kebijakan Terorisme Siber di Indonesia

Menangani masalah keamanan siber dan terorisme di Indonesia adalah tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada lebih dari 150 juta pengguna internet di Indonesia dan pada tahun 2018, 'Indonesia mengalami lebih dari 200 juta serangan siber.'²⁰ Untuk melindungi pengguna Indonesia dari serangan ini, Badan Siber dan Sandi Nasional Indonesia (BSSN) didirikan pada Mei 2017 di bawah Perpres 53 dan 133 tahun 2017. "Kepala Menteri Keamanan Wiranto memperingatkan pada hari Kamis bahwa ancaman teknologi tinggi menimbulkan keamanan serius. risiko di seluruh dunia, tetapi menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah ini."²¹

¹⁹<https://www.nationalsecurity.gov.au/Media-and-publications/Publications/Documents/Australias-Counter-Terrorism-Strategy-2015.pdf> accessed 26 April 2020

²⁰<https://theconversation.com/sibersecurity-for-indonesia-what-needs-to-be-done-114009> diakses pd tgl 30 April 2020

²¹<https://jakartaglobe.id/news/govt-has-taken-concrete-steps-to-counter-high-tech-threats-chief-security-minister-says/> accessed pada tgl 29 April 2020

f. Undang Undang dan Kebijakan Terorisme Siber di Australia

Mengatasi masalah keamanan siber dan terorisme di Australia adalah tanggung jawab Departemen Kejaksaan Agung dan Departemen Dalam Negeri. Undang-undang yang terkait dengan terorisme siber adalah Undang-Undang Hukum Pidana 1995. Tanggung jawab kebijakan untuk undang-undang siber anti terorisme Australia ada pada Departemen Kejaksaan Agung sementara peran operasionalnya adalah melalui Departemen Dalam Negeri yang didukung oleh Departemen Pertahanan dan Direktorat Sinyal Australia. Peran departemen ini adalah untuk mengembangkan kebijakan keamanan siber sejalan dengan kebijakan keamanan siber Pemerintah Australia, Strategi Keamanan Siber dan Rencana Aksi.

g. Undang Undang dan Kebijakan Mengembalikan Mantan ISIS di Indonesia

Kementerian yang bertanggung jawab untuk masalah mantan ISIS ke Indonesia adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Saat ini ada 689 mantan ISIS dari Indonesia saat ini di Suriah yang berjuang untuk ISIS di Irak dan Suriah. Jumlah ini termasuk istri dan anak-anak mereka. Masalah yang rumit adalah kenyataan bahwa banyak dari orang Indonesia ini telah menghancurkan paspor mereka.

Awalnya, kebijakan pemerintah Indonesia adalah bahwa mantan ISIS ini akan diizinkan untuk kembali ke Indonesia selama mereka membantah filosofi ISIS. Namun, baru-baru ini Presiden, Menteri Luar Negeri dan Menkopolhukam telah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa mantan ISIS ini tidak akan diizinkan untuk kembali. Setelah pertemuan dengan Presiden Indonesia pada hari Selasa 11 Februari 2020, Menkopolhukam menyatakan kebijakan berikut, "Tidak ada rencana untuk mengembalikan mantan teroris. Kami tidak akan mengambil kembali pejuang teroris asing ke Indonesia ... Untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun, kami dapat Mempertimbangkan kasus per kasus. Kami akan melihat apakah anak di bawah umur adalah yatim piatu."²²

²²Pengucapan oleh Menkopolhukam <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-refuses-to-let-isis-fighters-and-their-families-to-return-home> diakses pd tgl 30 April 2020

h. Undang Undang dan Kebijakan Mengembalikan Mantan ISIS di Australia

Departemen yang bertanggung jawab untuk masalah mantan ISIS ke Australia adalah Departemen Dalam Negeri. Undang-undang yang berkaitan dengan masalah ini adalah Undang-Undang Hukum Pidana 1995. Diperkirakan ada sekitar 150 warga Australia yang berperang di bawah panji ISIS di Timur Tengah, setidaknya 20 di antaranya telah kembali ke Australia. Terlepas dari para pejuang, ada sekitar 100 anggota keluarga yang saat ini berada di sebuah kamp di Suriah al-Hawl yang juga ingin pulang ke Australia.

Departemen Dalam Negeri telah menetapkan apa yang dikenal sebagai Tim Tersangka Pengembalian Teroris (RTST) di bawah tanggung jawab Polisi Federal Australia untuk mengelola ancaman kembalinya para mantan ISIS. "RTST mengoordinasikan lembaga penegak hukum negara bagian dan federal untuk memastikan seluruh pemerintah menyetujui untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh tersangka terorisme yang kembali dari zona-zona konflik."²³

9. Kerangka Teoritis

Taskap ini diinformasikan oleh dua teori oleh para penulis terkemuka di bidang penanggulangan terorisme. Yang pertama adalah oleh Richard Jackson, Eamon Murphy dan Scott Poynting dan judul buku itu adalah "Terorisme Negara Kontemporer: teori dan Praktik" dan yang kedua adalah buku karya Costas M. Constantinou dan Paul Sharp dan judul buku itu adalah "Perspektif Teoritis dalam Diplomasi".

a. Teori Kontra Terorisme

Menurut Jackson et al, salah satu masalah utama dalam menangani terorisme adalah bahwa penyembuhannya seringkali lebih buruk daripada penyebabnya. Ini terjadi karena negara yang menghasut tanggapan terhadap satu atau lebih peristiwa teroris merasa perlu menggunakan pendekatan yang keras terhadap terorisme, pertama-tama untuk membuktikan kepada konstituen mereka bahwa mereka bertanggung jawab atas situasi dan tidak akan mentolerir peristiwa semacam itu, dan

²³ Pengucapan dari Department of Home Affairs di <https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/fighting-terrorism/fighting-terrorism-overseas> diakses pd tgl 30 April 2020

kedua, negara ingin membuat contoh para pelaku yang ditangkap sehingga di masa depan mereka yang memikirkan terorisme akan berpikir dua kali. Ini telah menyebabkan fenomena bahwa para korban penanggulangan terorisme negara telah jauh melebihi jumlah yang disebabkan oleh teroris non-negara. Bagi Jackson et al, "Mengingat bahwa terorisme negara jauh lebih lazim dan destruktif daripada terorisme non-negara atau pemberontak, mengejutkan bahwa terorisme itu belum mendapatkan perhatian yang semestinya dalam hubungan internasional, studi keamanan atau bidang studi terorisme."²⁴

b. Teori Diplomasi

Ketika kebanyakan orang memikirkan kata "diplomasi", hal pertama yang mereka pikirkan adalah bagaimana bernegosiasi secara sopan dan santun dan memastikan bahwa apa pun hasilnya itu adalah kemenangan untuk kedua belah pihak. Namun, diplomasi tidak selalu seperti ini, kita hanya perlu melihat cara Presiden Amerika Serikat saat ini melakukan diplomasi internasional untuk memahami bahwa diplomasi kadang-kadang dapat dengan brutal.

Menurut Costas M. Constantinou dan Paul Sharp dalam buku mereka, "Perspektif Teoritis dalam Diplomasi", bidang hubungan internasional agak mengabaikan pentingnya diplomasi dalam hubungan internasional. Namun, penelitian dan pendapat baru di lapangan telah memberikan perspektif baru dan fokus pada diplomasi, perspektif ini berasal dari bidang terkait seperti sosiologi, antropologi, psikologi, teologi, filsafat dan studi budaya. "Studi-studi semacam itu mendukung perlunya pemahaman yang lebih majemuk dan gagasan diplomasi yang dipahami secara luas".²⁵

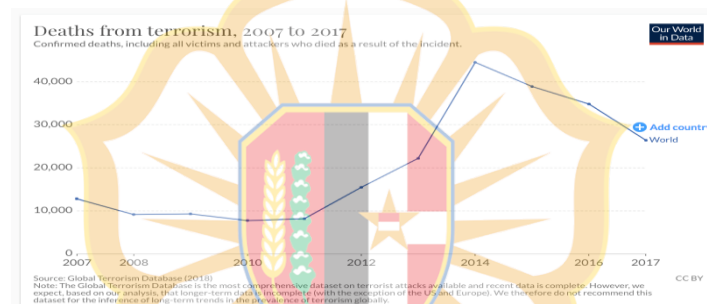
²⁴Richard Jackson, Eamon Murph and Scott Poynting, "Contemporary State Terrorism: Theory and Practice", published by Routledge, Taylor and Francis Group, London, p1.

²⁵Costas M. Constantinou and Paul Sharp, "Theroetical Perspectives in Diplomacy", published online by [researchgate.net/profile/Costas_Constantinou5](https://www.researchgate.net/profile/Costas_Constantinou5), p24.

10. Data dan Fakta

Tidak ada yang harus terkejut bahwa dalam dekade terakhir telah melonjak pada tahun 2014 tetapi selama 3 tahun berikutnya terlihat tren penurunan. Selama waktu ini rata-rata 21.000 orang telah terbunuh setiap tahun dengan yang terendah 8.000 kematian pada 2010 dan puncak 44.000 kematian pada 2014.

Di sebagian besar negara di dunia, terorisme menyumbang total kurang dari 0,01% kematian tetapi di negara-negara dengan konflik tinggi dan pemerintahan yang tidak stabil, jumlah ini bisa jauh lebih tinggi. Namun, data ini sangat spesifik secara geografis dengan 95% kematian di Timur Tengah, Afrika atau Asia Selatan pada 2017.



Tabel 1. Diambil dari: Hannah Ritchie, Joe Hasell, Cameron Appel and Maz Roser: Terrorism, Published online at OurWorldInData.org, Retrieved from: <https://ourworldindata.org/terrorism>

Indonesia telah mengalami 45 serangan teroris yang signifikan dalam 40 tahun terakhir. Terorisme di Indonesia sering menargetkan pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab untuk pencegahan terorisme di Indonesia. Banyak dari serangan ini menargetkan orang asing dari negara-negara Barat, secara signifikan untuk tujuan Taskap ini, banyak dari orang Barat itu adalah warga negara Australia. Seperti disebutkan, 88 dari kematian ini terjadi di Bali pada tahun 2002. Sejak tahun 2002, ada sejumlah serangan teroris di Indonesia, mereka termasuk; pada tahun 2003 di Bandara Jakarta, pada tahun 2004 di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, pada tahun 2005 di Pantai Jimbaran Bali, pada tahun 2009 di Ritz-Carlton dan J.W. Hotel Marriott di Jakarta, tahun 2016 di Starbucks Café Jakarta dan tahun 2018 di Surabaya di beberapa Gereja Kristen. Sebagai akibat dari serangan ini, ratusan kematian telah terjadi, jumlah ini termasuk setidaknya 100 warga negara Australia.

Australia belum mengalami jumlah korban yang sama dengan yang terjadi di Indonesia. Dalam 40 tahun terakhir Australia telah mengalami 11 serangan teroris yang signifikan. Mayoritas serangan ini dilakukan oleh kelompok teroris sayap kanan. Serangan paling signifikan dari serangan ini dilakukan oleh kelompok teroris sayap kanan yang dikenal sebagai “Gerakan Nasionalis Australia (ANM). Beberapa tempat bisnis Cina diserang dan dibom menyebabkan cedera serius pada beberapa warga negara Australia yang berasal dari Cina.

Di kedua negara ada ancaman yang ditimbulkan oleh organisasi teroris. Ancaman ini telah ditangani oleh pasukan keamanan di kedua negara. Sejak 2002, kerja sama antara Indonesia dan Australia di bidang anti-terorisme telah menjadi prioritas. Polisi nasional di kedua negara telah menjalin hubungan kerja sama yang sangat erat dengan JCLEC sebagai contoh keberhasilan kerja sama ini. Militer di kedua negara juga telah melakukan pelatihan anti-terorisme bersama. Dari contoh-contoh ini kita dapat melihat bahwa kerja sama antara Australia dan Indonesia tidak hanya mungkin tetapi sangat penting.

11. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis global dalam 20 tahun terakhir khususnya melihat perubahan besar. Perubahan-perubahan ini termasuk, kebangkitan Cina baik secara ekonomi maupun strategis, perang di Afghanistan yang ternyata menjadi konflik yang lebih lama daripada "Aksi Polisi" di Vietnam pada dekade 60 dan 70 yang pada saat itu dianggap sebagai sangat luar biasa lama. Konflik, perang teluk kedua (Second Gulf War) yang menjauhkan fokus dari wilayah Asia Tenggara, Amerika Serikat di bawah Donald Trump menjadi jauh lebih dalam mencari fakta yang telah meninggalkan sesuatu kekosongan di wilayah kita dan baru-baru ini pandemi global yang dikenal sebagai Covid 19 yang telah menutup perbatasan dan ekonomi yang hancur dengan dampak penuh yang belum dipahami.

a. Perang di Timur Tengah

Aliansi Australia dengan AS dan faktor-faktor lain telah membuatnya melakukan banyak keterlibatan dalam tiga perang di Timur Tengah belakangan ini. Jika Australia harus menghadapi masalah yang signifikan

di kawasan Asia Pasifik, keahlian dan personel serta sejumlah peralatan yang tersedia untuk ditempatkan secara tepat. Australia saat ini sedang melakukan re-fokus yang penting ke wilayahnya sendiri.

b. Pacific Step Up (Memfokuskan kembali)

Hasil dari fakta bahwa perhatian Australia telah diambil dari wilayahnya sendiri dapat dilihat dalam rencana Australia baru-baru ini untuk melakukan “Step Up” Pasifik untuk kembali terlibat dalam lingkup pengaruh tradisional di pulau-pulau Pasifik.

Pacific Step Up sebagaimana disebut bertujuan untuk membangun kembali hubungan historis yang dimiliki Australia di Pasifik. Dari perspektif Angkatan Laut, yang jelas merupakan fokus utama dari Step Up, lebih banyak kunjungan kapal perang direncanakan untuk memajukan hubungan diplomatik dan untuk menawarkan bantuan dalam bentuk pelatihan untuk kontingen Angkatan Laut setempat, pengiriman kapal Patroli kelas Forum Pasifik.

Table 3.50—South Pacific region expenditure, 2004–05 to 2006–07

| | 2004–05 Actual result (\$'000) | 2005–06 Actual result (\$'000) | 2006–07 Budget estimate (\$'000) | 2006–07 Actual result (\$'000) |
|--|---|---|---|---|
| Timor-Leste ¹ | 9,557 | 6,458 | 5,828 | 5,105 |
| Vanuatu | 1,267 | 1,766 | 1,808 | 1,740 |
| Solomon Islands | 1,307 | 2,351 | 3,131 | 3,749 |
| Tonga | 993 | 1,396 | 1,604 | 1,600 |
| Western Samoa | 603 | 2,333 | 726 | 732 |
| Cook Islands | 262 | 256 | 358 | 318 |
| Fiji | 2,996 | 5,539 | 4,416 | 2,811 |
| Republic of the Marshall Islands | 680 | 853 | 792 | 917 |
| Federated States of Micronesia | 795 | 989 | 910 | 836 |
| Tuvalu | 697 | 715 | 755 | 888 |
| Kiribati | 476 | 635 | 665 | 624 |
| Palau | 774 | 970 | 981 | 939 |
| Multilateral general assistance ² | 14,881 | 12,298 | 13,564 | 13,182 |
| Total | 35,269 | 36,559 | 35,538 | 33,439 |

Notes
1. Timor-Leste was reported under South-East Asia in the 2004–05 and 2005–06 Defence Annual Reports. Timor-Leste is now reported under the South Pacific region. This change has revised the total actual expenditure for 2004–05 and 2005–06 as reported in previous annual reports.
2. Funding relates mainly to support for the Pacific Patrol Boat Program.

Tabel 2. Diambil dari: Nautilus Institute for Security and Sustainability, accessed on 26 April 2020 at nautilus.org/publications/books/Australian-forces-abroad/pacific-islands/defence-cooperation-program-south-pacific/

c. Covid 19

Epidemi Covid 19 yang telah melanda dunia dalam beberapa bulan terakhir saat ini memiliki dampak bencana pada kehidupan masyarakat dan ekonomi di setiap negara di dunia, tanpa kecuali.

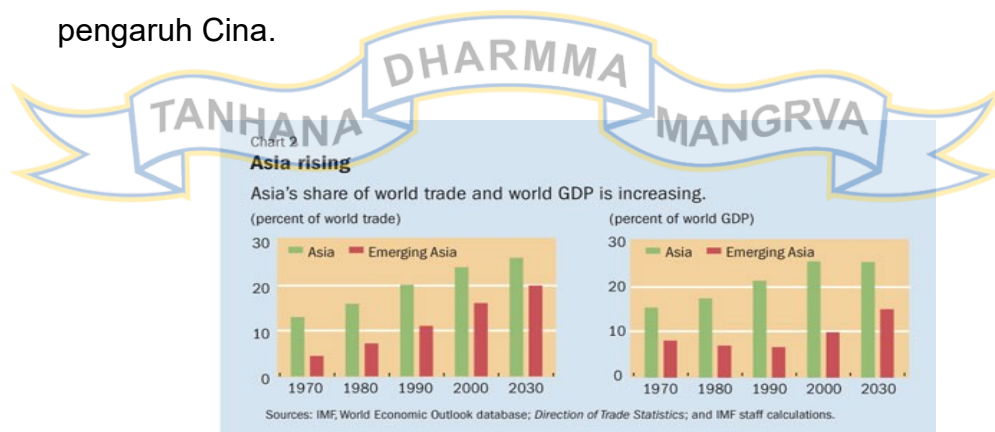
Semua negara di wilayah ini melawan untuk mengatasi masalah tersebut. Di Australia langkah-langkah ketat telah menjaga tingkat infeksi ke tingkat di mana Covid 19 tidak lagi dianggap pada tingkat pandemi,

namun sebagaimana dinyatakan di atas gelombang kedua belum mencapai. Di Indonesia, kematian akibat tingkat infeksi yang diketahui adalah sekitar 10%, ini bisa berarti bahwa mengingat rata-rata global sekitar 3% hingga 5%, tingkat infeksi pada akhir April 2020 sekitar 30.000. Virus Covid 19 akan menjadi faktor nomor satu terpenting yang mempengaruhi lingkungan strategis dunia, apalagi di kawasan Asia Pasifik.

Kegiatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia telah ditunda hingga akhir tahun 2020.

d. Pivot AS ke Asia

Alasan di balik pemerintahan Obama berporos ke Asia banyak yang tidak sedikit di antaranya adalah ancaman kebangkitan Cina dan pengaruh yang diharapkan akan diperoleh Cina di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar negara yang terkena dampak klaim sembilan titik Cina berada di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu AS melihat ini sebagai kesempatan untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara ASEAN karena negara-negara ASEAN mendorong kembali terhadap klaim teritorial oleh Cina. Sebagian besar negara ASEAN dengan pengecualian Laos dan Kamboja mendukung AS untuk menyeimbangkan pengaruh Cina di kawasan tersebut. Jadi AS melihat poros ini ke Asia memiliki manfaat ganda karena mereka dapat membina hubungan baik dengan negara-negara ASEAN dan pada saat yang sama menentang pengaruh Cina.



Tabel 3. Diambil dari: International Monetary Fund, accessed on 29 April 2020 at imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/06/singh.htm

Sejauh menyangkut keamanan, poros ke Asia juga masuk akal. AS sekarang melihat kebangkitan Cina sebagai ancaman keamanan

terbesarnya. Cina memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik, Cina telah memberikan pinjaman investasi asing yang signifikan baik untuk Laos dan Kamboja serta ke berbagai negara di Pasifik (lihat tabel 4).



Tabel 4. Diambil dari: The Sunday Times, accessed on 29 April 2020 at; [thetimes.co.uk/article/Australia-fears-chinese-influence-in-pacific-as-tonga-admits-debt-distress—mxzc9j9fr](https://www.thetimes.co.uk/article/Australia-fears-chinese-influence-in-pacific-as-tonga-admits-debt-distress-mxzc9j9fr)

e. Poros Maritim

Dari sudut pandang Indonesia, salah satu dampak terpenting pada lingkungan strategis adalah dorongan Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi tumpuan maritim. Indonesia tidak asing dengan manfaat laut dan perdagangan serta pengaruh yang diberikannya. Selama 600 tahun Kerajaan Sriwijaya yang berasal dari Palembang memerintah sebagian besar Asia Tenggara.

Lima pilar tumpuan maritim adalah; “Membangun kembali budaya maritim Indonesia, memelihara dan mengelola sumber daya laut, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim serta mengembangkan industri pelayaran dan wisata bahari, mengundang negara-negara lain untuk bekerjasama di bidang kelautan dan menghilangkan sumber konflik di laut dan mengembangkan kekuatan pertahanan maritim.”²⁶

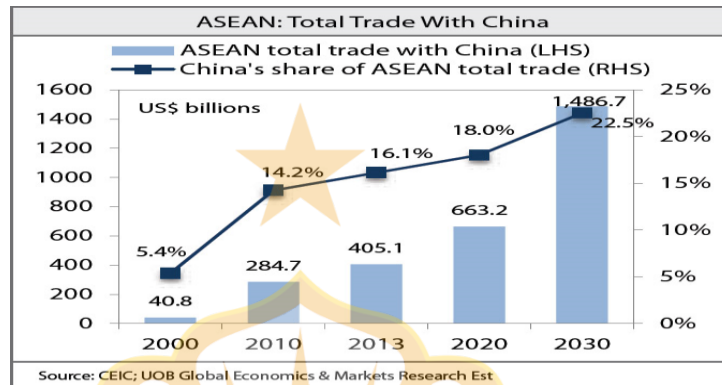
f. Bangkitnya Cina dan LCS

Sejak reformasi ekonomi tahun 1978, Cina telah menjadi ekonomi pasar yang telah difokuskan pada penciptaan kekayaan dan bersaing di panggung dunia untuk perdagangan. Peningkatan PDB Cina sangat spektakuler, sejak 1978 ketika PDB-nya adalah 150 miliar dolar AS, ia telah

²⁶Rendi A Witular (13 November 2014) Jokowi launches maritime doctrine of the world, The Jakarta Post, accessed 27 April 2020

melihat pertumbuhan eksponensial hingga titik pada 2017 PDB-nya mencapai 12,24 triliun dolar AS. Tingkat pertumbuhan PDB tahunan selama ini adalah 6% dengan beberapa tahun mencapai di atas 8%.

Ekonomi Cina sekarang adalah yang terbesar kedua di dunia di belakang AS, diharapkan bahwa Cina akan menyusul AS sebagai ekonomi nomor satu dunia dalam beberapa tahun mendatang.



Tabel 5. Diambil dari: Business in Asean, accessed on 29 April 2020 at; businessinasean.com/en/doing-business-in-asean/looking-beyond-asean/asean-and-Cina/the-Cina-connection-for-asean.htm

Untuk Taskap ini, fakta paling penting yang terkait dengan lingkungan strategis adalah yang terkait dengan Angkatan Laut kedua negara.

Indonesia melibatkan beberapa konfrontasi antara Penjaga Pantai Cina dan kapal Angkatan Laut Indonesia. Indonesia kini telah mengganti nama sektor utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi "Laut Natuna Utara" dalam upaya untuk mendorong kembali terhadap klaim teritorial Cina. Awalnya, Indonesia tidak terpengaruh oleh klaim sembilan garis putus-putus, namun Cina sejak itu mengklaim sebagian EEZ Indonesia di dekat Kepulauan Natuna.



Gambar 3. Diambil dari: Headline: Klaim Sepihak Cina di Perairan Natuna, Bagaimana Solusi Penyelesaiannya?, oleh Uopi Makdori pada tgl 8 Jan 2020 di Liputan 6.

Untuk Australia, yang bukan penuntut di Laut Cina Selatan, sengketa memiliki potensi untuk mengadu sekutu strategis terdekatnya, AS, terhadap mitra dagang terbesarnya, Cina. Dan, hubungan Australia dengan wilayah Asia Tenggara yang lebih luas mungkin terpengaruh. Posisi Australia adalah bahwa ia mendukung pesanan berdasarkan aturan internasional.

Australia telah menyatakan bahwa mereka bertekad untuk menggunakan hak lintasnya melalui wilayah yang disengketakan dengan melakukan latihan kebebasan navigasi (FONOPS). AS juga melakukan FONOPS di wilayah tersebut, namun AS sering melewati batas 12 mil laut, sedangkan Australia menolak melakukannya. Namun Australia, pada 18 April 2020, melakukan FONOPS di Laut Cina Selatan, seperti HMAS Parramatta, bersama dengan USS Bunker Hill, Uss America, dan USS Barry berlayar melalui daerah yang disengketakan.

g. Media Sosial

Penggunaan media sosial di mana-mana telah dan sedang mengubah lingkungan strategis di wilayah kita. Media sosial tersedia untuk setiap orang karena murah dan terjangkau. Media sosial memberikan suara kepada siapa pun yang menginginkannya melalui aplikasi perpesanan seperti WhastApp dan Facebook. Di Indonesia pada saat ini berada 300 juta HP.²⁷

²⁷ Prof Nizam, Ceramah di online Lemhannas berjudul Strategi Pendidikan Untuk Mendukung Pembangunan Nasional pada tgl 29 April 2020

Media sosial digunakan untuk mempengaruhi lingkungan strategis oleh negara, perusahaan multinasional (MNC), Organisasi Non-Pemerintah dan teroris. Penggunaan aplikasi pesan aman, WhatsApp, oleh organisasi teroris dan separatis di Indonesia dan Australia dalam perencanaan acara-acara teroris telah ditetapkan.

h. Terorisme Siber

Secara tradisional, serangan teroris telah mengambil bentuk kekerasan untuk kesehatan dan kesejahteraan warga negara. Namun, teror siber sekarang sedang meningkat di dunia maupun di kawasan kita. Salah satu kegunaan dunia siber yang paling terkenal untuk terorisme adalah oleh ISIS ketika mereka memposting foto eksekusi dengan memenggal kepala di internet. Bentuk terorisme ini memiliki dampak signifikan pada mereka yang kurang beruntung untuk diekspos ke pos-pos ini.

i. Pemberontakan di Filipina

Front Pembebasan Islam Moro adalah kelompok teroris yang bermarkas di Filipina selatan. Mantan anggota Moro bergabung dengan sub kelompok teroris yang dikenal sebagai Maute-Abu Sayaff Group. Kelompok ini dipimpin oleh Omar Maute, ada tujuan yang dinyatakan adalah untuk mendirikan Negara Islam yang berbasis di Mindanao, Filipina. Pada dasarnya kelompok ini tidak lebih dari sekelompok penjahat yang memeras uang dari penduduk setempat dan telah menggunakan nama baik Islam sebagai kedok untuk kegiatan mereka.

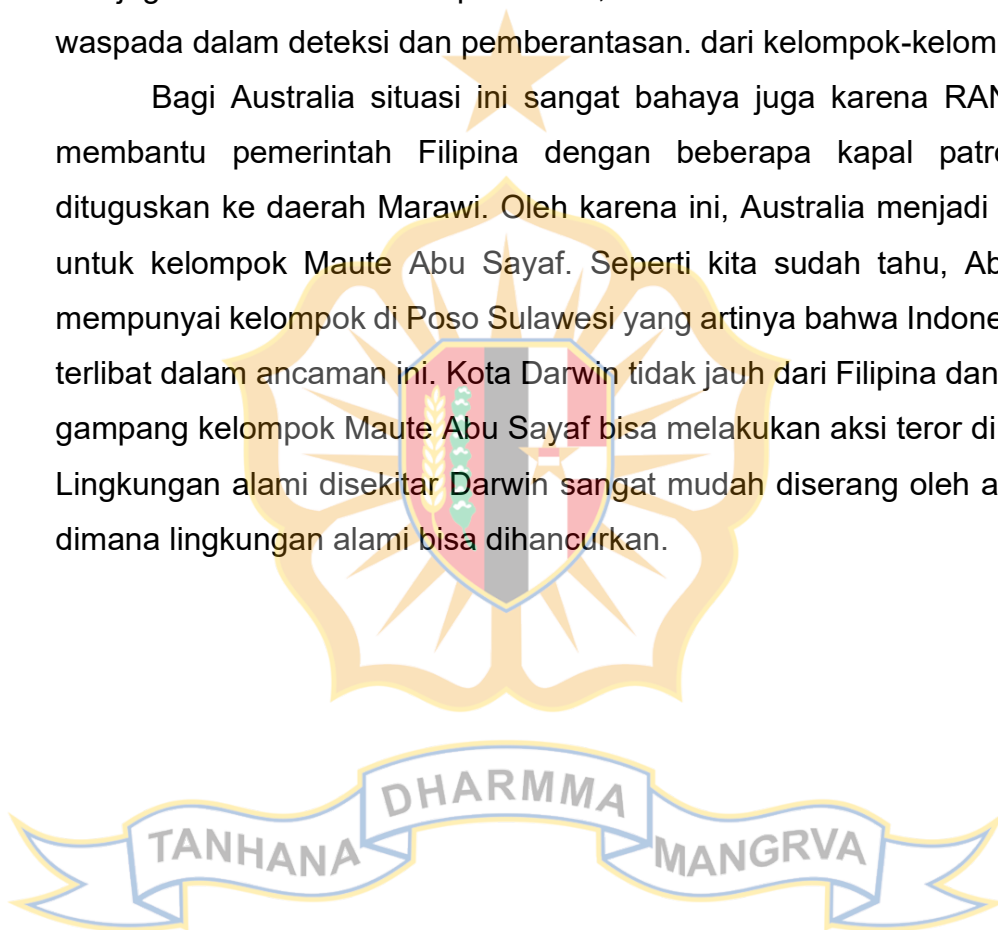
Kegiatan mereka dihadang oleh Filipina yang memuncak dalam pertempuran di kota Marawi pada bulan Januari dan Februari 2018. Pertempuran Setelah pertempuran Marawi, kelompok ini masih aktif.

Hal ini penting untuk lingkungan keamanan kawasan. Belum pernah teroris bersenjata mengambil alih dan menduduki wilayah di wilayah tersebut. Pertempuran itu melibatkan "974 militan yang terbunuh (termasuk 13 mantan ISIS), 12 militan yang ditangkap, 168 pasukan Pemerintah Filipina terbunuh atau ditangkap, 1.400 tentara pemerintah terluka dan 87 warga sipil tewas (40 karena sakit), dalam konflik."²⁸

²⁸https://en.wikipedia.org/wiki/Marawi_crisis, accessed 28 April 2020

Bagi Indonesia, kegiatan teroris militan di Filipina Selatan dekat dengan Indonesia. Mengingat bahwa pertempuran Marawi termasuk beberapa warga negara Indonesia, masalah bagi Indonesia adalah bahwa para pejuang ini telah membangun hubungan dengan para militan di Filipina dan telah mulai membangun jaringan. Mengingat masalah dengan batas-batas keropos di pulau-pulau timur kepulauan dan fakta bahwa organisasi teroris lainnya, khususnya Mujahidin Indonesia Timur (MIT) telah didirikan dan juga memiliki kesetiaan pada ISIS, otoritas keamanan Indonesia harus waspada dalam deteksi dan pemberantasan. dari kelompok-kelompok ini.

Bagi Australia situasi ini sangat bahaya juga karena RAN sudah membantu pemerintah Filipina dengan beberapa kapal patrol yang ditugaskan ke daerah Marawi. Oleh karena ini, Australia menjadi sasaran untuk kelompok Maute Abu Sayaf. Seperti kita sudah tahu, Abu-Sayaf mempunyai kelompok di Poso Sulawesi yang artinya bahwa Indonesia juga terlibat dalam ancaman ini. Kota Darwin tidak jauh dari Filipina dan dengan gampang kelompok Maute Abu Sayaf bisa melakukan aksi teror di Darwin. Lingkungan alami disekitar Darwin sangat mudah diserang oleh aksi teror dimana lingkungan alami bisa dihancurkan.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Tujuan dari Taskap ini adalah untuk membahas bagaimana menanggulangi berkembangnya terorisme di Indonesia dan Australia melalui kerjasama antara dua negara. Seperti dibahas sebelumnya dalam Bab II, penulis menganggap bahwa ada empat isu utama atau tugas yang penting untuk diatasi ketika mempertimbangkan pertanyaan ini. Konteks Indonesia-Australia bervariasi dari konteks di negara lain. Hal ini tidak lagi menjadi masalah karena sejarah dan geografi kita yang sangat berbeda.

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan menggunakan lensa berikut. Ancaman Terorisme di Negara, Mantan ISIS yang akan kembali ke Indonesia dan Australia, Siber dan Keamanan Maritim (Keamanan Maritim). Alasan untuk mengatasi masalah ini adalah bahwa keempat paradigma dianggap yang paling penting dalam konteks Indonesia-Australia.

13. Paradigma Nasional Kedua Negara.

Mungkin tidak ada dua negara yang bertetangga, di dunia yang lebih berbeda dari Indonesia dan Australia. Hampir setiap aspek sejarah kita dan situasi kita saat ini sangat berbeda. Indonesia adalah negara arkipalegik yang masih dihuni oleh masyarakat tradisionalnya sedangkan Australia dihuni oleh masyarakat Inggris, Masyarakat Australia dominan beragama kristen sebelumnya sedangkan Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dan Indonesia adalah negara baru sedangkan Australia telah ada beberapa abad.

a. Indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi, di mana Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini ada pada inti Pancasila, UUD 45, Wawasan Nusantara dan Tannas.

1) Pancasila

Pancasila adalah filosofi yang berisi 5 prinsip yaitu, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan

Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Indonesia. Negara Indonesia menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila sebagai prinsip panduan dasar dalam semua bidang kehidupan mulai dari politik hingga pertahanan nasional. Pancasila menekankan pentingnya perjuangan rakyat dan sub prinsip “Gotong Royong” yang pada dasarnya menekankan nilai komunitas.

2) UUD NRI TAHUN 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang lebih dikenal, UUD 45, adalah dasar untuk semua undang-undang di Indonesia. Jadi semua undang-undang anti-terorisme bergantung pada UUD 45. UUD 45 mengatur pemisahan kekuasaan antara badan peradilan, eksekutif dan legislatif pemerintah.

3) Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap Nusantara, yaitu persatuan bangsa dan negara. Wawasan nusantara atau yang disingkat sebagai Wasantara pada konsepsi yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan pada UUD NRI 1945 adalah “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan memunculkan persatuan dan hubungan antar bangsa dalam kaitannya dengan kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional”.²⁹

Wawasan Nusantara adalah prinsip pedoman visi negara kesatuan Indonesia. Wawasan Nusantara mencakup bumi, laut, dan ruang di atas nusantara. Filosofi itu melingkupi, aspirasi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan bangsa. Prinsip Pancasila adalah jantung dari filosofi Wawasan Nusantara.

²⁹[https://delviadelvi.wordpress.com/2010/04/14/pentingnya-pengaktualisasian-wawasan-nusantara-dalam-membangun-ketahanan-nasional/diakses 28 April 2020](https://delviadelvi.wordpress.com/2010/04/14/pentingnya-pengaktualisasian-wawasan-nusantara-dalam-membangun-ketahanan-nasional/diakses%2028%20April%202020)

4) Tannas

Ketahanan Nasional (Tannas) adalah keyakinan bahwa kekuatan ketahanan rakyat adalah alat bangsa yang memungkinkan bangsa untuk mempertahankan diri berdasarkan ketahanan rakyat. Tannas dikaitkan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Gotong Royong dalam hal ini merupakan prinsip dasar untuk pembangunan bangsa di mana rakyat berjuang bersama dengan ketahanan untuk mengatasi tantangan, khususnya di bidang pertahanan nasional. Karena itu prinsip Tannas sangat penting dalam bidang pemberantasan terorisme

b. Australia

Australia adalah negara federasi di mana negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan Westminster di mana Perdana Menteri adalah kepala Pemerintahan dan Kepala Negara adalah Kerajaan Inggris.

1) Konstitusi Australia

Konstitusi Australia adalah hukum tertinggi negara. Konstitusi Australia dirancang antara tahun 1898 dan 1900 oleh para pendiri bangsa yang pertimbangannya disetujui oleh rakyat melalui beberapa referendum, sebelum negara tersebut dibentuk pada tahun 1901. Sama dengan konstitusi Indonesia, konstitusi Australia memberlakukan pemisahan antara kekuatan antara kehakiman, eksekutif dan legislatif.

2) Common Law

Common law, yang diadopsi dari British Common Law, adalah serangkaian prioritas hukum yang telah disusun selama dua abad terakhir di Australia dan Common Law Inggris yang berasal dari abad ke-13. Sementara masyarakat Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Gotong Royong yang merupakan filosofi yang didasarkan pada perjuangan bersama dan dukungan dan perawatan masyarakat, Common Law di Inggris dan Australia lebih cenderung untuk menetapkan dan mendukung hak-hak individu. Ini adalah perbedaan mendasar yang penulis lihat di antara kedua negara.

14. Ancaman Terorisme di Kedua Negara

Baik Australia dan Indonesia telah mengalami banyak peristiwa teroris di masa lalu. Di Indonesia telah terjadi sejumlah serangan teroris di Jakarta, Poso, Surabaya dengan serangan terbesar terjadi di Bali pada tahun 2002. Terorisme tidak didukung oleh agama. Terorisme sering dikooptasi oleh para teroris tetapi para teroris ini pada dasarnya tidak digerakkan oleh prinsip-prinsip agama, tetapi mereka dimotivasi oleh kekuatan pribadi dan keserakahan. Agama bukan satu-satunya motivasi untuk aksi teroris, teroris juga dapat dimotivasi oleh ideologi politik.

a. Grup Teroris Aktif

1) Indonesia

a) Jema'ah Islamiyah (JI)

Jema'ah Islamiyah (JI) adalah kelompok pemberontak Islam ekstremis yang terhubung dengan Al-Qaeda dan Taliban, dan berkomitmen untuk Negara Islam di Asia Tenggara. Kelompok ini memiliki sel di Singapura, Malaysia dan memiliki hubungan dengan Front Islam Moro di Filipina. "Pedoman piagam dan operasi JI, Panduan Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyah" (PUP-JI), menguraikan prinsip-prinsip agama dan aspek administrasi yang menggaris bawahi tujuan utama JI".³⁰

JI telah bertanggung jawab atas sejumlah serangan teroris di Indonesia, yang paling terkenal di antaranya adalah Bom Bali pada tahun 2002. JI juga diduga melakukan pengeboman JW Marriott 2003, bom Kedutaan Australia 2004, bom Bali 2005 dan pemboman JW Marriott dan Ritz Carlton 2009 di Mega Kuningan Jakarta.

b) Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS)

Saat ini ada sekitar 500 warga negara Indonesia yang telah berjuang untuk ISIS yang masih di Timur Tengah menunggu untuk kembali ke Indonesia. Ada lebih dari 200 wanita dan anak-anak

³⁰Australian National Security Agency, nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/JemaahislamiyahJI.aspx accessed on 29 April 2020

yang merupakan warga negara Indonesia yang ingin kembali ke Indonesia. Mantan ISIS Indonesia ini sangat memprihatinkan.

Awalnya, Pejabat Kontraterorisme Indonesia menyatakan bahwa mereka siap untuk mengizinkan; “Ratusan mantan ISIS dan keluarga mereka yang ditangkap untuk kembali ke tanah air mereka, dengan satu syarat penting: Mereka harus meninggalkan ideologi radikal yang mendorong mereka ke Suriah dan Irak.”

³¹Namun, seperti yang akan kita bahas nanti dalam Tugas ini, Presiden Joko Widodo telah menolak untuk mengizinkan para pejuang untuk kembali. Setelah mengatakan ini, tidak diketahui berapa banyak mantan ISIS telah kembali ke Indonesia.

Perkiraananya bervariasi tetapi sebanyak 1.000 simpatisan ISIS dapat berada di atau akan berada di Indonesia. Para simpatisan ini pasti akan mencari untuk merekrut anggota baru. ISIS dapat menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keamanan Indonesia dalam waktu dekat. Mengingat keterampilan yang dimiliki oleh para mantan ISIS yang kembali ini, mereka lebih dari risiko yang signifikan.

c) Jamaah Ansharut Daulah (JAD)

JAD adalah salah satu organisasi teroris terafiliasi di Indonesia yang telah membuktikan afiliasi dengan ISIS. JAD telah dikaitkan dengan pemboman 2018 Surabaya dan pemboman Katedral Jolo 2019. JAD telah diakui oleh AS sebagai organisasi teroris.

Pada tahun 2018 keputusan dibuat oleh peradilan Indonesia bahwa anggota JAD dapat ditangkap hanya oleh Polisi yang dapat mengidentifikasi mereka sebagai anggota JAD.

³¹<https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-arrests-dozens-of-terror-suspects-ahead-of-poll-results>
accessed 30 April 2020

JAD diyakini bertanggung jawab atas serangan profil tinggi terhadap menteri keamanan Indonesia, Wiranto. Beberapa petugas Polisi juga terluka dalam serangan pisau itu.

2) Australia

Australia telah cukup berhasil dalam memecah sel-sel teroris potensial. Berikut ini adalah uraian dari organisasi teroris paling terkenal yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan di Australia.

a) ISIS

Sementara belum ada struktur organisasi ISIS yang sebenarnya teridentifikasi di Australia, karena profil tinggi ISIS, ada sejumlah serangan yang terinspirasi oleh ISIS atau secara langsung dipengaruhi oleh anggota ISIS saat ini atau sebelumnya.

b) Al-Shabaab

Al-Shabaab adalah gerakan pemuda dan merupakan kelompok fundamentalis jihad teroris yang berbasis di Afrika Timur. Organisasi ini diduga memiliki ikatan dan berkomitmen untuk tujuan Al-Qaeda.

Pada 2009, "anggota Al-Shabaab yang berbasis di Sydney dan Melbourne yang bersekutu dengan Al-Shabaab diselidiki oleh polisi. Lima pria Melbourne dituduh merencanakan serangan terhadap Barak Tentara Holsworthy. Menyusul insiden ini, kelompok itu diakui sebagai organisasi teroris terlarang"³²

c) Organisasi Teroris Sayap Kanan

Sementara Australia belum mengalami serangan teroris sayap kanan di Australia, seorang Australia bertanggung jawab atas serangan teror di Selandia Baru pada tahun 2019. Brenton Tarrant, seorang warga negara Australia, diradikalisasi ke titik di mana ia pindah ke Selandia Baru untuk melatih serangan terhadap Muslim sangat mungkin di Australia."³³

³²[En.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Australia](https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Australia) accessed 29 April 2020

³³[Thediplomat.com/2020/04/is-australia-taking-the-threat-of-right-wing-terrorism-seriously/](https://thediplomat.com/2020/04/is-australia-taking-the-threat-of-right-wing-terrorism-seriously/) accessed on 29 April 2020

Otoritas anti-terorisme Australia telah berhasil memerangi organisasi-organisasi teroris berbasis agama, namun banyak pakar di Australia sekarang khawatir bahwa ancaman serangan teror sayap kanan lebih merupakan ancaman. Baru-baru ini ada beberapa teroris sayap kanan yang ditangkap dan dituduh melakukan pelanggaran teror di Australia.

b. Kebijakan dan Struktur Aparat Terkait Dengan Terorisme di Kedua Negara

Dua lembaga pemerintah puncak yang bertanggung jawab atas undang-undang dan pemberantasan anti terorisme berada di Indonesia; BNPT dan di Australia; Departemen Jenderal Kejaksaan bersama dengan Departemen Dalam Negeri. Undang-undang terkait anti terorisme ada di Indonesia, UU No 15 tahun 2003 yang diperbarui pada tahun 2018 untuk lebih memperjelas peran TNI dan di Australia, KUHP 1995 dan didukung oleh Strategi Anti Terorisme Australia dan Perjanjian Antar Pemerintah untuk UU CT.

Di kedua negara, lembaga penegak yang bertanggung jawab atas penanggulangan terorisme adalah Polisi Nasional. Dan, di kedua negara, badan-badan militer tertentu yang terkait dengan tindakan anti terorisme mendukung polisi jika diperlukan dalam situasi operasional.

1) Indonesia

a) Densus 88

Badan ini adalah lembaga teratas di Indonesia untuk penegakan hukum anti terorisme operasional. Unit ini didirikan pada tahun 2003 setelah pemboman Bali tahun 2002. Unit ini telah mengembangkan reputasi yang mengesankan dalam pertempuran melawan kelompok-kelompok teroris di Indonesia.

b) Unit 81 Anti Terorisme

Unit ini terdiri dari prajurit terbaik dari Kopassus. Unit ini menggunakan senjata dan taktik khusus. Kekuatan unit dan jenis senjata tidak dipublikasikan.

c) Detasemen Jala Mangkara (Denjaka)

Unit ini terdiri dari anggota Pasukan Katak (Kopaska) dan Batalyon Pengintai Amfibi Korps Marinir (Taifib). Denjaka pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dan pada awalnya tidak disiapkan untuk tugas-tugas kontra teroris, namun pada tahun 1997 unit tersebut diberi nama saat ini. Detasemen 1 adalah pasukan khusus anti terorisme.

d) Detasemen Bravo 90 (Denbravo)

Unit ini berspesialisasi dalam penyelamatan sandera sebagai akibat dari pesawat yang dibajak. Pada 2015 sebuah komando khusus dibentuk untuk mengoordinasikan ketiga unit anti terorisme dari 3 lengan TNI. Komando bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan kontra terorisme di seluruh dunia. Revisi undang-undang anti-terorisme Indonesia pada tahun 2018 mengesahkan peran TNI dalam penanggulangan terorisme. Akibatnya, Komando didirikan pada 30 Juli 2019. Saat mendirikan Komando, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, berbicara, "Saya adalah ayah dari tiga angkatan yaitu AD, AL dan AU, untuk itu saya harus adil terhadap tiga angkatan. Dalam kedinasan sehari-hari saya menggunakan baju loreng TNI sebagai perwujudan integrasi tiga angkatan".³⁴ Keempat unit di atas dimasukkan ke dalam Pusat Kontrol Krisis BNPT (Pusdalsis).

2) Australia

Seperti di Indonesia, agensi utama yang memiliki tanggung jawab untuk menangani terorisme di Australia adalah Polisi Federal Australia. Sedangkan Kepolisian Nasional Indonesia memiliki satu struktur komando dan satu set hukum yang mengatur perang melawan terorisme, di Australia, ada 6 negara bagian dan 2 wilayah yang mengelola layanan kepolisian mereka sendiri. Meskipun ada

³⁴Tni.mil.id/view-156121-panglima-tni-resmikan-satuan-koopssus-tni.html accessed on 29 April 2020

undang-undang anti teror nasional, negara bagian dan teritori juga memiliki hukum pidana sendiri.

Meskipun demikian, AFP memiliki tanggung jawab nasional untuk respon operasional terhadap serangan teroris di Australia. AFP telah membentuk "Tim Penanggulangan Terorisme Bersama" yang memiliki maksud serupa dengan Densus 88 di Indonesia. Tim-tim ini terdiri dari elemen-elemen dari AFP, pasukan polisi negara bagian dan Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO).

a) Unit Taktik Polisi Federal

AFP memelihara tim-tim ini di seluruh Australian. Tim-tim ini merespons untuk menyelesaikan insiden teroris berisiko tinggi.

b) Special Air Service (SASR)

SASR adalah prajurit pasukan khusus elit yang berada di bawah komando langsung Komando Operasi Khusus (SOCOM). Di dalam unit, kelompok yang bertanggung jawab untuk penanggulangan terorisme adalah Kelompok Penyerang Taktis (Barat). Grup ini bertanggung jawab untuk bertindak kembali pada peristiwa teroris di pantai barat Australia dan luar negeri.

c) Resimen Komando ke-2

Resimen ini dikelola oleh tentara pasukan khusus dan juga di bawah komando langsung SOCOM. Unit ini berbasis di pantai timur Australia dan karena itu bertanggung jawab untuk bertindak kembali atas insiden teroris di pantai timur.

c. Kesempatan Bekerjasama

1) Situasi Sekarang Ini

Seperti yang ditunjukkan oleh kerjasama antara ADF dan Polri setelah pemboman Bali pada tahun 2002, Australia dan Indonesia memiliki kapasitas yang signifikan untuk bekerjasama ketika mereka menghadapi musuh yang signifikan dan umum. "AFP terus bekerjasama dengan Polri dalam upaya melawan terorisme melalui pengaturan kerja kolaboratif, posisi penghubung

dan inisiatif pengembangan kapasitas. Saat ini ada 23 petugas AFP yang bekerjasama Polri di Indonesia.”³⁵ Pendirian Pusat Kerjasama Penegakan Hukum di Jakarta adalah contoh sempurna tentang bagaimana kedua negara dapat bekerjasama.

Pasukan khusus kedua negara telah bekerja bersama sekarang di bidang terorisme kontra selama lebih dari 25 tahun. Menteri Pertahanan Indonesia dan Australia bersama dengan Menteri Pertahanan dari negara-negara kawasan lain menghadiri “Pertemuan Menteri Pertahanan Sub-Regional tentang Anti Terorisme” pertama pada tanggal 1 - 2 Februari 2018. Selama pertemuan ini, Menteri Payne dan Menteri Ryamizard menegaskan kembali perlunya kerjasama dan berbagi intelijen. Pada pertemuan tersebut sejumlah hasil kerja praktis disepakati yaitu:

- a) Untuk angkatan bersenjata regional untuk berbagi lebih banyak pelajaran dari operasi terbaru, terutama di dalam latihan dan kegiatan yang ada.
- b) Pertukaran analitik intelijen tingkat kerja yang berfokus pada terorisme. Dan
- c) Untuk menjajaki peluang untuk meningkatkan kerjasama pertahanan regional dalam penanggulangan terorisme maritim.³⁶

2) Kerjasama Pada Masa Depan

Ada dua komponen anti terorisme, yang pertama adalah peran penguasaan penegakan hukum dan yang kedua adalah peran pencegahan. Pertama, peran penegakan telah berkembang dengan baik di kedua negara dan diuntungkan oleh kerjasama yang erat. Namun, untuk meningkatkan kerjasama di kedua negara, diperlukan koordinasi nasional yang lebih baik. Kedua, peran pencegahan belum berkembang dengan baik. Ada peluang

³⁵ <https://www.afp.gov.au/sites/default/files/PDF/countering-terrorism.pdf> diakses pd tgl 30 April 2020

³⁶ Outcomes of the Inaugural Sub-Regional Defence Minister’s Meeting on Counter Terrorism, <https://www.defence.gov.au/annualreports/17-18/Features/RegionalMtg.asp> diakses pd tgl 30 April 2020

saat ini bagi kedua negara kita untuk saling belajar, khususnya Australia dapat belajar dari Indonesia mengingat bahwa bagian penting dari ancaman teroris adalah oleh organisasi-organisasi Islam.

a) Peran Penegakan

Kerjasama timbal balik adalah pada tingkat yang sangat matang, namun banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerjasama ini dengan dorongan koordinasi yang lebih baik antara BNPT di Indonesia dan Departemen Kejaksaan Agung dan Departemen Dalam Negeri di Australia. Akan berarti bahwa pengawasan umum terhadap semua kegiatan dan pelatihan aparaturnya oleh dua pihak akan mencapai hasil yang jauh lebih baik.

Pada saat ini, peluang untuk melakukan tolak ukur dan belajar dari pengalaman satu sama lain serta peluang untuk mengikuti kursus pelatihan yang ditargetkan dengan baik dan tidak dimanfaatkan karena banyak entitas individu yang tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh lembaga lain baik secara internal maupun secara eksternal.

Kemudian, bekerjasama diantara kedua negara, Indonesia dan Australia untuk menanggulangi ancaman terorisme di kedua negara, tergantung diatas koordinasi di tingkat atas lebih lancar dan untuk konsolidasi dan meningkatkan pelatihan dan pembagian intelijen yang sudah ada, apa yang diperlu adalah mekanisme dimana petugas Kepolisian dan Militer akan bekerjasama dengan lebih ketat dan membangun kepercayaan diantara keduanya mereka.

Sebagai bagian dari strategi nasional di kedua negara yang saling mendukung, kedua negara harus mengatasi kekurangan koordinasi di tingkat senior dan pengumpulan intelijen di tingkat kerja kedua negara. Kelompok kerja bilateral dengan tanggung jawab yang jelas yang terdiri dari pemimpin senior kedua organisasi, AG dan BNPT, yang

ditugaskan untuk mengoordinasikan upaya semua lembaga di kedua negara.

Masalah koordinasi ini bisa ditangani dengan beberapa aksi, yaitu;

1. Koordinasi Lebih Lancar

Australia melalui otoritas utama dalam melawan terorisme, Departemen Kejaksaan Agung (AG) dan Indonesia melalui otoritas pimpinannya, BNPT, harus merangkul semua elemen pemerintah dan non-pemerintah dan mengembangkan strategi nasional anti terorisme di kedua negara yang saling mendukung dengan kebijakan nasional masing-masing yang dapat mencegah ancaman terorisme di wilayah Asia Tenggara.

Sebagai bagian dari strategi nasional di kedua negara yang saling mendukung, kedua negara harus mengatasi kekurangan koordinasi di tingkat senior dan pengumpulan intelijen di tingkat kerja kedua negara. Kelompok kerja bilateral dengan tanggung jawab yang jelas yang terdiri dari pemimpin senior kedua organisasi, AG dan BNPT, yang ditugaskan untuk mengoordinasikan upaya semua lembaga di kedua negara.

2. Pusat Mengumpulkan Intelijens dan Kesadaran Situasi Regional

Untuk memungkinkan pengumpulan intelijen dan kesadaran situasional dengan lebih baik, pusat regional untuk tujuan ini harus didirikan di kedua negara untuk lebih memahami di tingkat lokal, apa yang terjadi di masyarakat lokal. Pusat mengumpulkan data regional ini harus memiliki kemampuan untuk secara langsung menginformasikan kepemimpinan senior Departemen

AG dan BNPT yang kemudian akan memastikan bahwa informasi tersebut dibagikan dan dianalisis.

Pusat ini harus dikelola oleh personil yang memiliki pengalaman di tingkat nasional yang memahami nuansa pelaporan ke kantor pusat di mana data dapat diinterogasi dan disebarluaskan. Selain staf ini, sangat penting bagi staf di pusat regional untuk memiliki pengetahuan budaya, bahasa, dan jaring sosial setempat sehingga mereka dapat memperoleh kepercayaan dari komunitas lokal.

3. Mekanisme yang akan Mendukung Hubungan Dekat di Antara Petugas Kepolisian dan Militer.

Kerja sama ini dapat sangat ditingkatkan melalui pengembangan hubungan orang ke orang. Hubungan interpersonal yang kuat diantara personil dari kedua negara yang terlibat dalam penegakan hukum anti-terorisme sangat penting dan akan membantu meningkatkan kapasitas Australia dan Indonesia untuk membentuk pencegahan lingkungan terorisme regional.

Untungnya, mekanisme ini sudah ada. Ikahan adalah alumni antara pasukan pertahanan kedua negara yang memiliki lebih dari dua ribu anggota dari semua angkatan dan semua peringkat.

Ikahan harus dilakukan oleh Indonesia dan Australia dan diperluas ke personil Polisi dan mungkin anggota departemen lain yang terlibat dalam aparat keamanan. Ikahan membina hubungan personil yang erat antara alumninya dengan mengadakan malam ceramah, acara olahraga, dan seminar. Ini dapat diperluas untuk mencakup program personel pertukaran ditugaskan ke negara lain untuk bekerja di area operasional.

ADF memiliki pengalaman yang signifikan dalam berurusan dengan mekanisme terorisme operasional mengingat pengalaman mereka di Timur Tengah selama tiga dekade terakhir. Kedua negara harus secara nominal mengakui Australia sebagai agen utama terkait dengan penegakan terorisme.

b) Peran Pencegahan – (Countering Violent Extremism - CVE)

Mengatasi terorisme di Indonesia dan Australia semata-mata bergantung pada keberhasilan implementasi tindakan pencegahan. “Program-program berkembang pesat di banyak negara lebih cepat daripada pemahaman tentang program-program ini. Faktanya, relatif sedikit yang diketahui tentang tipe dasar dan karakteristik dari berbagai program dan intervensi penanggulangan kekerasan ekstremisme (CVE) yang telah dibuat di seluruh dunia.”³⁷ Yang perlu kita pahami adalah pendekatan apa yang paling berhasil. Sampai saat ini kerjasama diantara Indonesia dan Australia hanya sedikit.

Peran pencegahan sedang ditangani di Indonesia oleh BNPT melalui program yang dikenal sebagai Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) dan di Australia, meskipun AFP tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan program, AFP memiliki tujuan CVE untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat yang diidentifikasi untuk mengurangi ancaman terorisme.

Program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dibentuk oleh BNPT di sebagian besar provinsi di seluruh nusantara. Program ini melibatkan, pemimpin dan pakar pemerintah daerah, mantan perwira Polisi dan Militer,

³⁷ https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2100/RR2168/RAND_RR2168.pdf
diakses pd tgl 30 April 2020

akademisi dan organisasi nasional seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh FKPT dalam mencegah radikalisme dan terorisme adalah dengan melalui pendekatan nilai-nilai budaya dan agama. Dan peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mencegah berkembangnya radikalisme.

Satu saran untuk meningkatkan program adalah menjadikannya program yang didasarkan ditingkat masyarakat paling bawah yang dilakukan oleh teman-teman dan saudara pelaku. Meskipun demikian, BNPT memang memiliki keahlian di bidang ini dan dapat memberikan saran ahli yang signifikan kepada pihak berwenang Australia di bidang yang paling penting untuk mencegah terorisme.

Manfaat yang signifikan dapat diperoleh oleh kedua belah pihak dengan kerjasama yang lebih baik di bidang pencegahan. Indonesia memiliki pengalaman yang signifikan dalam bidang ini dan harus dilihat sebagai lembaga utama dalam koordinasi antara Australia dan Indonesia.

15. Mantan ISIS yang akan kembali ke Indonesia dan Australia

Para pejuang ini telah sangat diindoktrinasi oleh ISIS dan telah membuktikan bahwa mereka siap mati untuk tujuan mereka. Mereka juga memiliki keterampilan dalam pembuatan bom dan taktik teroris yang telah diasah di bawah api di Timur Tengah. Ada 689 mantan ISIS yang ditawan di Suriah dan menunggu pemrosesan, banyak dari mereka telah menghancurkan paspor mereka sehingga sangat sulit untuk mengkonfirmasi identitas mereka oleh pihak berwenang Indonesia. Mengingat komitmen mereka yang ditunjukkan terhadap kekerasan ekstremisme, mereka menimbulkan ancaman yang signifikan di kedua negara kita. Fakta ini telah dibawa pulang ke pihak berwenang di Indonesia sebagai akibat dari pemboman 2018 di Surabaya. "Mereka yang tertangkap termasuk enam pria yang telah kembali ke rumah setelah melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Juru bicara

kepolisian nasional Mohammad Iqbal mengatakan pada hari Jumat (17 Mei) para tersangka berusia antara 24 dan 45 tahun berasal dari sel teroris Jemaah Ansharut Daulah (JAD) di Jawa Tengah.”³⁸

a. Situasi Sekarang Ini

1) Indonesia

Bagi Indonesia, keputusan telah diambil untuk tidak mengakui para mantan ISIS yang kembali untuk kembali ke Indonesia. Awalnya dianggap bahwa para pejuang ini akan dipulangkan, namun, baru-baru ini keputusan ini dibatalkan oleh Presiden. Pada kunjungan baru-baru ini ke Lemhannas oleh menteri luar negeri Indonesia, beliau mengkonfirmasi keputusan yang diambil oleh Presiden, dengan mengatakan; “Orang-orang ini merupakan ancaman berbaya bagi keamanan Indonesia, sehingga Indonesia tidak akan mengizinkan mereka untuk kembali dan paspor mereka akan dibatalkan”³⁹

Banyak dari mantan ISIS ini sekarang ditahan di Turki yang menuntut agar mantan ISIS dipulangkan. Di bawah hukum Indonesia, pemerintah memang memiliki kekuatan untuk membatalkan kewarganegaraan para mantan ISIS ini. Konvensi PBB 1961 tentang Pengurangan Kewarganegaraan memberi komitmen oleh negara-negara anggota bahwa mereka tidak akan membuat warga negara menjadi kewarganegaraan. Ini mensyaratkan bahwa negara menetapkan perlindungan dalam hukum kewarganegaraan mereka untuk mencegah kewarganegaraan saat lahir dan di kemudian hari.⁴⁰ Indonesia bukan penandatangan konvensi ini.

Meskipun keputusan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, ada suara-suara yang berbeda pendapat di Indonesia, salah satu dari suara-suara ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang

³⁸ <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-arrests-dozens-of-terror-suspects-ahead-of-poll-results>

³⁹ Indonesian Foreign Minister, Retno Marsudi, following a presentation to students, 12 Mar 2020

⁴⁰ UN Convention on Statelessness, <https://www.unhcr.org/en-au/un-conventions-on-statelessness.html> diakses pd tgl 30 April 2020.

berbasis Islam, yang menyerukan kembalinya para pejuang ini ke Indonesia berdasarkan alasan kemanusiaan.

Banyak orang Indonesia juga mendukung opsi kemanusiaan. Pendapat mereka adalah bahwa Indonesia harus mendukung warganya pada tingkat pertama. Orang-orang ini tidak dihukum karena kejahatan apa pun di pengadilan mana pun. Mereka menyatakan bahwa membawa para pejuang ini kembali ke masyarakat mungkin sebenarnya merupakan langkah positif karena mereka mungkin dapat membantu bahwa “pihak berwenang Indonesia mungkin dapat mengeksploitasi pengetahuan dan pengalaman mereka”⁴¹

2) Australia

Masalah kembalinya mantan ISIS bukanlah masalah besar bagi Australia seperti juga bagi Indonesia. Saat ini hanya ada sekitar 8 pejuang dan 60 anggota keluarga mereka. Konon, seandainya salah satu dari pejuang ini kembali ke Australia dan terlibat dalam insiden teroris, ini berpotensi berarti kematian 10 atau bahkan 100 warga negara Australia. Jadi taruhannya tinggi di kedua negara.

Keputusan saat ini yang diambil oleh pemerintah Australia adalah bahwa terlalu berbahaya untuk membawa pulang para mantan ISIS dan keluarga mereka. Menurut Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, mereka “Memiliki potensi dan kapasitas untuk kembali ke sini dan menyebabkan acara korban massal”.⁴² Namun, jika Australia akan memulangkan keluarga setidaknya, keputusan untuk melakukannya harus diambil lebih cepat daripada kemudian karena invasi Turki ke Suriah Utara membuat situasi semakin berbahaya dari hari ke hari. AS pada Oktober 2019

⁴¹ Amelinda Bonita Leonard, Research Assistant for the department of politics and social change, Centre for Strategic and International studies (CSIS), “Repatriation to avoid worse problems”, The Jakarta Post, Friday February 28 2020.

⁴² Statement by Australian Foreign Minister, Mr Peter Dutton, accessed at <https://theconversation.com/why-australia-can-no-longer-avoid-responsibility-for-its-citizens-held-in-syria-127439> diakses pd tgl 30 April 2020

menawarkan untuk membantu Australia dengan mengekstraksi keluarga-keluarga ini, namun bantuan itu ditolak oleh Australia. Masalah lain dari menunggu tentu saja adalah fakta bahwa pikiran anak muda di kamp-kamp ini dipengaruhi oleh teroris yang masih aktif dan keras. Opsi ini mungkin terlihat lebih menarik mengingat ditinggalkannya negara induk mereka, Australia.

Mengingat bahwa Australia adalah penandatangan Konvensi PBB 1961 tentang Pengurangan Kewarganegaraan, pada titik tertentu warga negara Australia ini harus dipulangkan ke Australia, kecuali jika negara pihak ketiga dapat ditemukan. Ini tentu saja akan menjadi masalah tersendiri karena Australia akan merasa sulit untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam masalah ini.

b. Kesempatan Bekerjasama

Indonesia dan Australia berada dalam posisi yang sangat berbeda mengenai kembalinya pejuang ISIS. Indonesia telah membuat pengumuman bahwa para pejuang asing ini tidak akan diizinkan untuk kembali ke Indonesia. Indonesia juga memiliki undang-undang yang mengatur para pejuang ini, Ayat 12 dari UU Terorisme 5/2018 memungkinkan hukuman penjara hingga 15 tahun. Namun, tidak ada ketentuan dalam undang-undang ini untuk menolak masuk. Australia telah membentuk RUU Terorisme (Perintah Pengecualian Sementara) 2019, undang-undang ini mengizinkan menteri dalam negeri untuk menolak kembalinya seorang warga negara Australia yang berusia di atas 14 tahun ke Australia yang dipercayai alasan Menteri, memiliki hubungan teroris. Di bawah undang-undang baru, Perintah Pengecualian Sementara dapat dikeluarkan jika Menteri secara wajar percaya seorang warga negara mungkin ingin memberikan bantuan atau dukungan kepada organisasi teroris. Setelah menyelesaikan periode dua tahun, orang tersebut dapat mengajukan aplikasi berikutnya yang harus disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Jika izin untuk kembali diberikan, orang tersebut akan tunduk pada persyaratan yang ketat termasuk menyerahkan paspor mereka dan pemantauan oleh badan intelijen dan keamanan Australia.

Australia sampai saat ini belum bekerjasama dengan pemerintah Indonesia sehubungan dengan kembalinya mantan ISIS. Saat ini dianggap sebagai masalah bagi negara bagian untuk memilah diri mereka sendiri. Sampai batas waktu tertentu ini benar dan mengingat keadaan yang sangat berbeda di kedua negara, masuk akal, namun di bawah naungan Perjanjian Lombok, ada ruang lingkup untuk setidaknya membentuk sub komite dengan perwakilan dari kedua negara.

Meskipun undang-undang terorisme seperti diuraikan di atas sangat berbeda, ada ruang bagi Indonesia dan Australia untuk bekerja sama untuk menghadapi masalah ini.

Di bawah naungan Perjanjian Lombok, sebuah sub komite yang terdiri dari anggota BNPT (FKPT) dan AFP (Diversion Program), dapat bekerja sama, menggunakan keahlian dan pengalaman mereka, untuk mempertimbangkan pilihan apa yang akan terjadi di masa depan seandainya para pejuang dan keluarga mereka dapat atau bahkan terpaksa kembali ke kedua negara. Sub komite Traktat Lombok akan bertemu secara teratur untuk membahas isu-isu terkini dan bagaimana masalah ditangani di masing-masing negara. Penyusunan undang-undang baru sehubungan dengan mantan ISIS yang akan dikembalikan ke kedua negara juga akan dibahas sehingga kedua pihak akan mengambil kebijakan yang cocok.

Program CVE yang dipimpin oleh Indonesia, yang beroperasi di kedua negara, adalah jawaban ideal untuk masalah ini. Program CVE akan terdiri dari konselor dari kedua negara yang merupakan spesialis di bidang ini. Penasihat dari Indonesia yang memahami Islam dan juga memahami adat istiadat yang berkaitan dengan agama akan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan program pengalihan terorisme di Australia.

16. Terorisme Siber

Dengan lebih dari 150 juta pelanggan internet dan 300 juta telepon seluler digunakan oleh orang Indonesia, dan di Australia 90% rumah tangga

terhubung ke internet. Namun, apa artinya ini adalah bahwa pengalaman kedua negara sebagai akibat dari serangan teror tradisional mungkin menjadi tidak penting dibandingkan dengan potensi devastasi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari serangan teroris siber di masa depan. Indikator yang memungkinkan dari kemungkinan ini adalah angka-angka yang mengkhawatirkan dari Australia di mana, "Pada 2016-17, 5% pengguna internet menyatakan bahwa mereka telah mengalami penyalahgunaan informasi pribadi dan 9% pengguna internet menyatakan mereka mengalami kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh virus atau infeksi komputer lainnya."⁴³

Dari perspektif terorisme, internet dan dunia digital menawarkan peluang yang menarik bagi organisasi teroris untuk menyebarkan propaganda mereka dan migrasi serangan teroris fisik mereka ke dunia siber. Kerusakan yang dapat digunakan secara online bersifat eksponensial dibandingkan dengan bentuk-bentuk tradisional terorisme.

a. Indonesia

Indonesia selama beberapa dekade rentan terhadap serangan siber. Sebuah ilustrasi risiko di Indonesia adalah bahwa pada tahun 2019, "dalam satu minggu di bulan Februari, Indonesia mengalami 1,35 juta serangan web"⁴⁴ Dan, Indonesia berada di peringkat ketiga negara teratas karena menjadi sumber serangan siber. Angka-angka yang berkaitan dengan pendanaan keamanan siber di Indonesia tidak jelas, namun karena secara keseluruhan negara-negara ASEAN menghabiskan rata-rata 0,06% dari PDB mereka dan mengingat Indonesia terlambat masuk ke dalam perlindungan ruang sibernya, tampaknya Indonesia telah menghabiskan lebih sedikit dengan baik dari jumlah ini. Indonesia seperti halnya di sebagian besar Asia Tenggara beresiko menderita serangan teroris siber yang signifikan dan kemungkinan besar akan menjadi salah satu negara teratas yang menjadi tuan rumah serangan siber.

⁴³ <https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/8146.0> diakses pd tgl 30 April 2020

⁴⁴ <https://theconversation.com/sibersecurity-for-indonesia-what-needs-to-be-done-114009> diakses pd tgl 30 April 2020

Untuk alasan ini pemerintah Joko Widodo membuat keputusan pada tahun 2017 untuk membentuk badan keamanan siber yang sekarang dikenal sebagai Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Menurut situs web agensi, peran agensi ini sangat banyak dan ini artinya bahwa, terutama dengan pendanaannya kecil, kalau BSSN akan dapat menyelesaikan kewenangan ini:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang, deteksi, perlindungan, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis, pusat kontak siber, sentra informasi, bantuan mitigasi, Pemulihan Pencegahan, insiden dan / atau serangan siber,
- 2) pelaksanaan pembinaan dan dukungan administrasi untuk seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN,
- 3) pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.”⁴⁵

Salah satu cara penting di mana BSSN menangani remit mereka adalah dengan menggunakan program yang dikenal sebagai "Honeypot" yang merupakan bagian dari "Proyek Honeynet". Honeynet adalah organisasi nirlaba yang terlibat dalam koordinasi penyelidikan serangan siber secara global. Organisasi ini didirikan pada tahun 1999 dengan tujuan utama, “Untuk mempelajari alat, taktik dan motif yang terlibat dalam serangan komputer dan jaringan, dan berbagi pelajaran yang dipetik.”⁴⁶ Platform ini dapat membantu Indonesia dalam mengidentifikasi ancaman dan juga menemukan sumber serangan teror siber.

b. Australia

Serangan siber paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir adalah serangan terhadap Gedung Parlemen Australia pada awal 2019. Sebagai akibat dari serangan ini, email dan data milik politisi sendiri dan partai-partai politik sudah tidak aman. Karena kekhawatiran diplomatik internasional, Perdana Menteri Morrison tidak secara langsung menuduh pemerintah Cina mensponsori serangan itu, namun menurut

⁴⁵Pernyataan dari website BSSN, <https://bssn.go.id/tugas-dan-fungsi-bssn/> diakses pd tgl 1 May 2020.

⁴⁶<https://www.honeynet.org/about/> diakses pd tgl 2 May 2020

laporan Direktorat Sinyal Australia (ASD), orang Cina mungkin bertanggung jawab. “Belum diungkapkan siapa yang diyakini berada di balik serangan itu atau rincian laporan ASD.”⁴⁷ Jika ini benar, ini penting karena memberikan preseden bahwa pemerintah asing siap untuk menggunakan serangan siber / terorisme sebagai cara untuk memajukan kepentingan mereka.

Tanggung jawab kebijakan untuk undang-undang siber anti terorisme Australia ada pada Departemen Kejaksaan Agung sementara peran operasionalnya adalah melalui Departemen Dalam Negeri yang didukung oleh Departemen Pertahanan dan Direktorat Sinyal Australia. Peran departemen ini adalah untuk mengembangkan kebijakan keamanan siber sejalan dengan kebijakan keamanan siber Pemerintah Australia, Strategi Keamanan Siber dan Rencana Aksi.

c. Kesempatan Bekerjasama

Bidang terpenting untuk kerjasama kedua negara adalah pemberantasan serangan siber teroris yang diluncurkan di kedua negara. Ini jelas merupakan masalah yang signifikan bagi Indonesia mengingat Indonesia termasuk dalam 3 besar negara sumber serangan teroris. Australia di sisi lain telah berhasil dalam menanggulangi agen-agen teroris yang menggunakan internet untuk meluncurkan serangan-serangan ini.

Sama seperti internet yang tidak mengenal batas, baik tanggapan Indonesia maupun Australia tidak dapat memiliki batas, maka kebutuhan untuk menjalin kerjasama antara kedua negara.

Untuk memfasilitasi kerjasama ini, di Bogor pada tanggal 31 Agustus 2018, Dr Tobias Feakin, Duta Besar Australia untuk Urusan Siber dan Dr Djoko Setiadi, M.Si, Kepala BSSN Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) tentang kerjasama siber. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini didasarkan pada;

⁴⁷ <https://www.smh.com.au/politics/federal/intelligence-agencies-pinned-parliament-hack-on-beijing-report-20190916-p52rou.html> diakses 1 May 2020

“Memperhatikan minat bersama mereka dalam memperkuat kerjasama antara Peserta berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik dan dengan demikian berkontribusi pada saling menguntungkan dan hubungan persahabatan antara kedua negara.”⁴⁸ Perwakilan dari masing-masing negara akan menghadiri Dialog Kebijakan Siber yang bertemu setiap tahun. Kisaran topik untuk Nota Kesepahaman, adalah, berbagi informasi dan praktik terbaik, pengembangan kapasitas dan penguatan koneksi, ekonomi digital dan kejahatan siber.

Yang dibutuhkan sekarang adalah untuk bergerak melampaui Nota Kesepahaman dan membentuk komite tetap. Komite yang berdiri harus menyiapkan sejumlah sub komite untuk melapor kembali setiap 6 bulan. Membantu Indonesia dalam perang melawan peluncuran serangan siber harus menjadi prioritas utama. Australia dapat mempertimbangkan untuk menjadi bagian dari proyek Honeypot untuk membantu memfasilitasi alat dasar untuk kerjasama. Komite akan mempertimbangkan tindakan seperti:

- 1) Strategi untuk membuat negara bertanggung jawab atas serangan siber yang berasal dari dalam perbatasan negara. Strategi ini dalam contoh pertama akan melihat Australia dan Indonesia bekerja bersama dan mengambil tanggung jawab atas serangan yang dimulai di wilayah masing-masing dan memastikan lembaga penegak hukum di kedua negara memiliki wewenang untuk menuntut para kriminal siber.
- 2) Memulai perjanjian di ASEAN bahwa suatu negara, meskipun memiliki undang-undang yang menentang serangan siber seperti itu, negara itu sendiri akan bertanggung jawab atas serangan itu dan menuntut para kriminal.

⁴⁸<https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/siber-affairs/Pages/mou-indonesia-australia-siber-cooperation> diakses pd tgl 2 May 2020

- 3) Indonesia dan Australia selanjutnya dapat mendorong sanksi untuk dijatuhkan pada negara-negara yang tidak menganggap serius, serangan siber diluncurkan di negara mereka. Ini bisa melalui ASEAN, East Asia Summit, atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
- 4) Australia harus menggunakan hubungannya dengan A.S. untuk Indonesia dan Australia untuk mencari bantuan di bidang ini. A.S. adalah pemimpin dalam keamanan Siber dan akan menjadi sumber daya yang berharga. The White House Siber Strategy menyatakan; “AS akan memfasilitasi hubungan antar negara yang mengembangkan kapasitas keamanan Siber”.⁴⁹

17. Keamanan Maritim (Maritime Security)

Keamanan maritim tidak hanya melibatkan kapal yang mengangkut barang atau penumpang, rig minyak, saluran pipa, kabel bawah laut dan bentuk-bentuk benda penting lainnya seperti perikanan dan pariwisata juga dapat dianggap sebagai bagian dari rangkaian sumber daya yang perlu dilindungi dari terorisme. dan ancaman lainnya. Baik Australia maupun Indonesia kaya akan sumber daya maritim dari perikanan hingga minyak dan gas. Kedua negara perlu mempertahankan fokus yang tajam pada perlindungan aset-aset ini, baik melalui penegakan hukum maupun regulasi, pemberlakuan dalam contoh pertama tentu saja jatuh ke tangan Angkatan Laut kedua negara.

Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah serangan teroris telah terjadi. Beberapa serangan yang lebih signifikan adalah, serangan terhadap Avrasya pada tahun 1996 di mana 177 penumpang dan 55 kru disandera, serangan terhadap teroris USS Cole Al-Qaeda pada tahun 2000 yang mengakibatkan kematian 17 pelaut AS, serangan bom bunuh diri di MV

⁴⁹ The White House International Strategy for Siberspace, Prosperity, Security and Openness in a Networked World, Hal 14, diterbitkan online di https://media.defense.gov/2017/May/11/2001745613/-1/-1/0/CPP_0001_YANNAKOGORGOS_SIBER_TTRIBUTION_CHALLENGE.PDF, diakses 25 Mei 2020.

Limberg pada tahun 2002 di mana satu kru anggota terbunuh dan akhirnya serangkaian serangan terhadap pengiriman di lepas pantai timur Afrika oleh perompak Somalia sejak dimulainya perang saudara Somalia yang dimulai pada 1990.

a. Lingkungan Maritim Indonesia

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengakui pentingnya sejarah Indonesia dan masa depan menandakan niatnya untuk sekali lagi menjadikan Indonesia sebagai tumpuan maritim. "Kami pernah jaya sebagai bangsa pelaut. Kehidupan ekonomi kami sebagian besar berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut kini kami bergantung pada pusat ekonomi dan politik dunia, sebagai titik tumpu dua samudera Samudera Pasifik dan Samudera Hindia," kata Jokowi.⁵⁰

Poros maritim memiliki lima pilar:

- 1) Pilar pertama: pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
- 2) Pilar kedua: Berkomitmen dalam mengelola dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan dengan menggunakan perikanan sebagai pilar utama.
- 3) Pilar awal: Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan pembangunan tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
- 4) Pilar belakang: Diplomasi maritim yang mengundang semua mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan
- 5) Pilar setuju: Membangun kekuatan pertahanan maritim."⁵¹

b. Lingkungan Maritim Australia

Australia, tidak seperti Indonesia tidak berada dalam posisi strategis penting untuk pelayaran internasional, pada kenyataannya satu-satunya pelayaran yang menuju Australia adalah kapal yang

⁵⁰ <https://news.detik.com/berita/d-3191949/presiden-jokowi-suarakan-ri-sebagai-poros-maritim-dunia-di-sidang-imo> diakses pd tgl 1 May 2020

⁵¹ https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menjuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata diakses pd tgl 1 May 2020

secara khusus melakukan perdagangan dengan Australia. Namun, seperti yang dinyatakan di atas, Australia seperti Indonesia sangat bergantung pada sumber dayanya yang berada di laut. Sumber daya penting bagi Australia adalah ladang gas alam yang terletak di lautan ke Utara dan Barat Laut negara itu. Australia harus memastikan bahwa ia dapat mempertahankan sumber daya ini dari serangan teroris.

Australia adalah pengekspor gas alam terbesar di dunia. “Ekstraksi minyak dan gas merupakan sekitar 2,0 persen dari PDB Australia. Pendapatan industri sekitar AUD 34 miliar.”⁵² Menjadi jelas pentingnya memerangi potensi terorisme di bidang maritim. Untuk melakukan ini, Australia memerlukan peraturan dan kapasitas penegakan untuk memastikan keamanan objek vitalnya yang terletak di lautan. Kapasitas penegakan ini disediakan di utama oleh Angkatan Laut Australia.

c. Kemampuan Penegakan Terorisme Maritim Indonesia

Kekuatan Angkatan Laut Indonesia (TNI-AL) adalah sekitar 60.000 dan memiliki armada sekitar 50 unit armada utama dan kapal perang kecil serta 5 kapal selam. Sebagian besar dari armada Indonesia saat ini, yang berbasis di tiga pangkalan Angkatan Laut di wilayah kepulauan Barat, Tengah dan Timur, adalah sisa Perang Dunia II yang perlu diperbarui. Angkatan Laut Indonesia saat ini sedang melalui proses pembaruan dan memiliki aspirasi untuk menjadi Angkatan Laut “blue water”. Personel TNI-AL adalah pelaut yang sangat terlatih dan kompeten.

TNI-AL memiliki tradisi yang membanggakan dari tindakan Yos Sudarso ketika dia menjadi Kapten Macan Tutul pada Pertempuran Laut Arafura hingga tindakan oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma di

⁵² Parliamentary Business Committees Senate Economics Corporate Tax Report, <https://www.aph.gov.au/Parliamentary%20Business/Committees/Senate/Economics/Corporatetax45th/Report/c05> diakses pd tgl 2 May 2020.

Laut Merah. Serangan Somalia yang paling menonjol adalah serangan terhadap kapal berbendera Indonesia MV Sinar Kudus. Pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk naik kapal dengan paksa dan mengatasi para penyerang. Sekelompok pasukan Kopassus turun dari KRI Abdul Halim Perdanakusuma dan mengambil kembali kapal itu sementara kelompok pasukan Kopassus lainnya melakukan serangan helikopter terhadap para teroris yang mengakibatkan semua teroris terbunuh.

d. Kemampuan Penegakan Terorisme Maritim Australia

RAN adalah Angkatan Laut "Blue Water" modern yang mengandalkan teknologi daripada bobot angka untuk kemampuannya.

Kekuatan personel RAN saat ini adalah 15.000. RAN saat ini sedang menjalani program re-newal yang dikenal sebagai Angkatan Laut Generasi ke-5. Program ini akan melihat pengiriman, 2 Kapal Pengisian baru, 8 Frigate Kelas Hunter baru, 3 Destroyer Kelas Hobart baru, 2 Kapal Helikopter Pendarat Kelas Canberra baru, 12 Kapal Patroli Kelas Arafura baru, 3 Mine Hunter Kelas Arafura baru, dan 12 Kapal Selam Kelas Attack baru.

RAN memiliki sejarah dan reputasi yang membanggakan yang ditempa dalam Perang Dunia I dan II. Dalam Perang Dunia I, RAN Cruiser HMAS Sydney bertanggung jawab atas tenggelamnya SMS Emden dalam Pertempuran Kepulauan Cocos. Tindakan ini dianggap sebagai langkah pertama yang penting dalam pengalaman perang RAN. Selama Perang Dunia II, RAN terlibat dalam Pertempuran Kreta, Pertempuran Yunani, Pertempuran Laut Jawa, Pertempuran Laut Karang dan Pertempuran Selat Sunda.

e. Kesempatan Bekerjasama

Dalam bekerjasama, tujuan utama TNI-AL dan RAN dalam mengalahkan ancaman teroris adalah untuk mengamankan dua strategi, yaitu, Pengendalian laut (kondisi yang ada ketika seseorang memiliki kebebasan penggunaan suatu wilayah laut) dan penolakan laut (kemampuan untuk menolak musuh kemampuan menggunakan laut) strategi penting untuk memastikan keamanan maritim di kedua negara,

Angkatan Laut di kedua negara harus memastikan mereka memiliki kemampuan untuk mencapai strategi ini.

TNI-AL dan RAN sudah memiliki hubungan dekat. Ada sejumlah perjanjian dan Nota Kesepahaman yang berlaku di mana kedua Angkatan Laut bekerjasama baik secara operasional maupun dalam hal perencanaan dan persiapan.

1) Kerjasama Saat Ini

a) Indian Ocean Naval Symposium (IONS)

Baik Australia dan Indonesia memiliki kepentingan pribadi dalam urusan Samudra Hindia. Lautan Hindia membentuk bagian penting dari wilayah kedua negara. Simposium Angkatan Laut India atau IONS, terdiri dari 21 negara yang merupakan negara-negara samudera Hindia. Baik Indonesia dan Australia adalah negara anggota IONS. "Forum ini membantu menjaga hubungan damai antar negara, dan karenanya sangat penting untuk membangun arsitektur keamanan maritim yang efektif di Wilayah Samudera Hindia dan juga merupakan dasar bagi kemakmuran kita bersama."⁵³

b) Western Pacific Naval Symposium (WPNS)

Indonesia dan Australia adalah anggota Western Pacific Naval Symposium (WPNS). WPNS memiliki lebih dari 20 anggota dan yang penting, berbeda dengan IORA, menghitung Cina dan AS dan negara-negara maju yang kuat lainnya sebagai anggota. Tujuan forum ini adalah untuk memajukan kerjasama antara negara-negara anggota.

c) High Level Committee (HLC) and the Maritime Operations Working Group

The High Level Committee (HLC) adalah pertemuan tahunan yang melibatkan Panglima TNI dan Ketua ADF. Sub komponen penting dari komite ini untuk Taskap ini adalah Sub

⁵³RAN Publications <https://www.navy.gov.au/ions> diakses pd tgl 2 May 2020

Komite yang berjudul “Kelompok Kerja Operasi Maritim”. Kelompok Kerja Operasi Maritim atau MOWG bertanggung jawab kepada HLC untuk kerjasama maritim melalui fasilitasi pelatihan antara kedua angkatan laut.

- d) Pertemuan Tahunan CN dan KASAL dan Navy to Navy Talks (N2N)

CN dan KASAL melakukan pertemuan ini setiap tahun. Pembicaraan ini lebih ditujukan pada tingkat kerja dan telah menetapkan agenda yang ditindaklanjuti oleh sub komite. Pembicaraan N2N diketuai oleh Wakil Kepala Angkatan Laut (DCN) dari RAN dan WAKASAL dari TNI-AL.

- e) Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan

Pertemuan ini adalah dialog tingkat tinggi yang dilakukan setiap tahun. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas masalah yang telah muncul pada tahun sebelumnya dan untuk lebih memperdalam dan memperkuat kerjasama antara kedua negara. Menurut Menteri Luar Negeri Australia saat ini, Marise Payne, “Negara-negara kita telah berbagi komitmen untuk memerangi terorisme, memastikan keamanan maritim, mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan kita, dan bekerja untuk memperkuat arsitektur keamanan regional.”⁵⁴

- f) Patroli Terkoordinasi (AUSINDO CORPAT)

Patroli terkoordinasi telah dilakukan oleh TNI-AL dan RAN sejak 2010 dan dikenal sebagai AUSINDO CORPAT. Patroli terkoordinasi ini dilakukan selama sepuluh hari dan berujung pada "washup" di akhir patroli. Sayangnya patroli ini hanya patroli yang "terkoordinasi" dan bukan patroli gabungan.

Latihan Kakadu yang merupakan latihan multi nasional, dilakukan dua tahun sekali, di mana TNI-AL biasanya berpartisipasi

⁵⁴ Statement by the Australian Foreign Minister, Marise Payne as published on the DFAT website, diakses pd tgl 2 May 2020

dengan penyediaan sebuah Corvette. Latihan New Horizon juga merupakan latihan dua tahunan yang disponsori oleh TNI-AL di Surabaya. Australia mengirimkan Frigate dan Tanker. Latihan Cassowary adalah latihan dua sisi tahunan yang khusus untuk Minor War Vessels (MWV). Latihan Indo Pacific Endeavour (IPE) adalah latihan yang dilakukan oleh RAN, namun Indonesia adalah salah satu fokus utama dari latihan tahunan. Pada 2019, latihan IPE mencakup 1.200 personel dan 4 Major Fleet Units (MFU) dan sebuah kapal selam. Komandan Kelompok Tugas pada tahun 2019 adalah Marsekal Muda Owen yang mengatakan, IPE 2019, “Ini adalah kontribusi besar bagi keamanan dan stabilitas regional dan memperdalam keterlibatan dan kemitraan Australia dengan pasukan keamanan regional.”⁵⁵

2) Kesempatan Bekerjasama di Masa Depan

Aturan internasional didasarkan pada UNCLOS, namun seperti yang telah kita lihat baru-baru ini, meskipun Cina telah menandatangani UNCLOS, mereka tidak mengikuti aturan yang jelas tentang alokasi wilayah laut. Baik dalam hal ini mereka mematuhi hukum internasional yang dijatuhkan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional. Putusan sehubungan dengan kasus 2016 yang dibawa ke pengadilan oleh dan dimenangkan oleh Filipina diberhentikan oleh Tiongkok.

Interoperabilitas adalah kunci untuk hubungan Indonesia Australia di wilayah maritim. Interoperabilitas ini tidak akan meluas ke pengadaan kapal, melainkan interoperabilitas ini harus berbasis orang dan termasuk; Nota Kesepahaman (MOU), Prosedur Operasional Standar (SOP), pemahaman satu sama lain dalam bahasa, pelaksanaan patroli gabungan yang konsisten dan berkelanjutan di perairan teritorial kedua negara, kehadiran pada

⁵⁵ Pengucapan Oleh Commander Task Group IPE 2019, diterbitkan online di Navy News, https://news.navy.gov.au/en/May2019/IPE19/5243/Smiles-the-key-to-a-successful-IPE19.htm#.XqpgEJP7T_Q diakses pd tgl 2 May 2020

kursus di kedua negara yang dirancang seputar kegiatan operasional dan berbagi pengalaman terkait untuk pelayaran. Kegiatan-kegiatan berikut akan membangun hubungan kami dan kemampuan kami untuk bekerja lebih baik bersama di bidang maritim untuk mengatasi terorisme:

a. Nota Kesepahaman (MOU)

Pelaksanaan patroli gabungan di perairan teritorial masing-masing adalah langkah penting dan akan membutuhkan pemahaman komprehensif tentang hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Nota Kesepahaman terkait dengan pelaksanaan patroli gabungan perlu terkait dengan bidang-bidang tertentu yang akan diidentifikasi oleh masing-masing pemerintah.

b. Prosedur Operasi Standar (SOP)

Saat melakukan patroli gabungan atau terkoordinasi, satu set SOP lengkap diperlukan untuk mengatur apa yang diharapkan saat melakukan patroli di laut. SOP ini pada tingkat pertama akan didasarkan pada UNCLOS dan konvensi maritim lainnya seperti MARPOL (Konvensi Internasional untuk pencegahan Polusi dari Kapal). SOP ini akan menjadi tanggung jawab Komando Armada di Australia dan Komando Armada Unit 1 Armada I di Indonesia.

c. Pelatihan Bahasa Indonesia dan Inggris

Setiap tahun di setiap negara harus menjalankan kursus bahasa yang ditawarkan kepada para Petugas dan Pelaut yang kemungkinan akan bergabung dalam patroli gabungan atau terkoordinasi. Kursus-kursus ini akan fokus pada bahasa yang terkait dengan lingkungan Angkatan Laut / Maritim. Setiap kursus dapat terdiri dari hingga 40 peserta pelatihan.

d. Perilaku Patroli Gabungan yang Konsisten dan Terus-menerus

Pekerjaan baik yang telah dilakukan oleh Angkatan Laut Indonesia dan Australia adalah dasar untuk saat ini melakukan lebih banyak patroli terkoordinasi yang berada di perairan kedua negara. Patroli yang terkoordinasi ini akan melibatkan MFU dan MWV dari kedua Angkatan Laut dan juga akan melibatkan skenario yang melibatkan serangan teroris terhadap benda-benda vital nasional. Skenario ini dapat melibatkan pengiriman pedagang, rig minyak atau gas dan jaringan pipa telekomunikasi.

e. Kursus Pelaut

Kursus dapat ditawarkan di kedua negara dan hanya akan menjadi kursus singkat, misalnya penanganan kapal kecil. Semua anggota yang menghadiri kursus akan diharuskan untuk tinggal dalam kekacauan dan berbagi kamar dengan Petugas atau Pelaut dari negara lain. Pelatihan dan waktu yang dihabiskan bersama ini akan menumbuhkan saling pengertian dan membangun hubungan semua orang yang penting.

Efek dari latihan bersama ini akan menjadi dua kali lipat, pertama akan meningkatkan kerjasama kedua angkatan laut di ruang kontra terorisme dan kedua akan mengirimkan pesan yang kuat kepada para teroris yang harus mereka renungkan serangan seperti itu di perairan kedua negara, maka mereka akan disambut dengan respons yang kuat.

BAB IV

PENUTUP

18. Kesimpulan

Australia dan Indonesia telah dan masih, menghadapi masalah terorisme selama 20 tahun dan dalam beberapa hal ini telah menjadi hal yang positif karena kedua negara yang memiliki masa lalu yang bermasalah, telah dipaksa untuk terlibat dalam perang melawan isu ini.

Seperti yang telah ditunjukkan dalam bab II dari Taskap ini, Australia dan Indonesia bersama-sama telah menetapkan undang-undang terorisme di wilayah hukum mereka sendiri dan telah dibentuk lebih lanjut, perjanjian-perjanjian, MOU dan forum baik secara bilateral maupun multilateral. Kedua negara memiliki kerjasama bilateral yang erat dan melalui ASEAN (Australia telah dibawa ke dalam kerja sama ini melalui Pertemuan Plus Menteri Pertahanan ASEAN - ADMM Plus), kedua negara telah menjadi pemimpin dalam perang melawan terorisme di wilayah tersebut.

Taskap ini telah menguraikan undang-undang dan perjanjian, para pemain yang terlibat, situasi saat ini dan merekomendasikan apa yang dapat dilakukan lebih lanjut dalam memerangi terorisme di Australia dan Indonesia. Untuk melakukan ini, penulis fokus pada; Ancaman Terorisme di kedua Negara, Mantan ISIS yang akan kembali ke Indonesia dan Australia, Terorisme Siber dan Keamanan Maritim (Keamanan Maritim).

a. Ancaman Terorisme di Kedua Negara

Ancaman terorisme di kedua negara masih pada tingkat yang sangat tinggi. Serangan teror baru-baru ini di Surabaya dan Sydney adalah contohnya. Kedua negara memiliki undang-undang dan mekanisme fisik lainnya untuk memerangi terorisme dan selanjutnya telah terlibat secara bilateral satu sama lain. Namun, koordinasi yang lebih baik diperlukan di kedua negara di mana departemen pemerintahan utama memiliki visi penuh tentang masalah saat ini dan sumber daya yang ada untuk mengatasinya.

b. Mantan ISIS

Mantan ISIS yang akan kembali ke Indonesia dan Australia - Para pejuang ini memiliki keterampilan dan pengalaman untuk melakukan serangan di masa depan dan juga memberikan pengetahuan mereka kepada anggota baru. Masalah ini sedang berlangsung dan meskipun Indonesia telah membuat keputusan untuk tidak memulangkan para teroris ini, Australia belum melakukannya. Ada masalah hukum dan moral yang harus diatasi.

c. Terrorime Siber

Potensi kerusakan bencana pada ekonomi di kedua negara sangat besar. Seperti yang telah dibuktikan dengan penggunaan teknologi oleh ISIS di Suriah, untuk investasi kecil, kelompok-kelompok teroris dapat mendatangkan kerusakan eksponensial dan dengan demikian meminta pemerintah di kedua negara untuk menebus filosofi jahat mereka.

d. Keamanan Maritim

Keamanan Maritim adalah prioritas utama. Tidak hanya transport, tetapi juga rig minyak, tempat penangkapan ikan dan jaringan pipa dan kabel bawah laut berisiko. Indonesia memiliki 3 ALKI utama dan salah satu selat tersibuk di dunia untuk dilindungi. Angkatan Laut yang kuat di kedua negara sangat penting, dan sama pentingnya adalah kerja sama dan interoperabilitas di antara kedua negara. Kerja sama berada pada level yang kuat, namun masih banyak yang harus dilakukan secara khusus di ruang kontra terorisme.

19. Saran

Diuraikan dalam Taskap ini adalah ancaman bagi Indonesia dan Australia dan undang-undang dan langkah-langkah yang saat ini ada untuk memerangi ancaman ini. Rekomendasi untuk kerja sama di masa depan dalam empat bidang spesifik yang dianggap sebagai faktor paling penting tercantum di bawah ini:

a. Ancaman Terrorisme di Kedua Negara

Untuk menghadapi risiko terorisme di kedua negara, solusinya adalah dua cara, pertama respon fisik terhadap teror dan kemudian pengalihan atau CVE dari cita-cita teroris individu:

1) Penegakan Hukum Terrorisme

Apa yang diperlukan adalah koordinasi yang lebih baik antara organisasi-organisasi pemimpin senior di masing-masing negara. Ini akan memastikan bahwa kesempatan untuk pelatihan dan pelajaran dari ini akan dimanfaatkan.

Karena terorisme itu dinamis, respons fisiknya juga harus dinamis. Kalau kita mau memastikan bahwa tingkat kerjasama diantara petugas di kedua negara sangat optimal, harus meningkatkan koneksi individu ke individu melalui alumni.

2) Pencegahan - Diversi atau (CVE)

BNPT memang memiliki keahlian di bidang pencegahan dan dapat memberikan saran ahli yang baik kepada pihak Australia. Indonesia, terutama melalui program FKPT memiliki banyak pengalaman terkait dengan pencegahan terorisme dan harus dilihat sebagai lembaga yang memimpin dalam hubungan antara Australia dan Indonesia.

b. Mantan ISIS yang akan kembali ke Indonesia dan Australia

Meskipun sudah ada perbedaan kebijakan di masing-masing negara, direkomendasikan bahwa, di bawah naungan Traktat Lombok, sub-komite bilateral harus dibentuk untuk menentukan kebijakan yang menandai masalah tersebut.

Indonesia mempunyai pengalaman luas tentang kebudayaan Islam dan orang yang mau ikut kelompok teroris. Oleh karena ini, Indonesia dapat ambil peran kepemimpinan untuk kedua negara. Indonesia sudah menjalankan program intervensi yang cukup berhasil. Konselor dan ahli yang lain dalam bidang ini bisa bekerjasama dengan pihak Australia untuk membangun program CVE di Australia.

c. Terorisme Siber

Indonesia berada di tiga negara teratas di dunia karena menjadi negara sumber serangan teroris siber sedangkan Australia telah menetapkan hukum dan pencegahan yang kuat. Australia dapat membantu Indonesia dalam bidang ini dan dapat mengambil peran utama dalam tanggapan dua sisi. Nota Kesepahaman yang menguraikan parameter dari kerja sama bilateral ini dapat dibentuk.

Masalah yang paling penting terkait dengan pencegahan terorisme siber adalah memaksa negara tertentu mengambil tanggung jawab untuk serangan siber yang diluncurkan dari negara mereka. Indonesia dan Australia seharusnya melaksanakan persetujuan dimana kalau serangan siber diluncurkan dari negara sendiri kemudian pemerintah dari negara tersebut akan ambil tanggung jawab. Selain itu, Australia melalui hubungan dekat dengan A.S, akan minta bantuan teknis untuk Indonesia dan Australia menghadapi terorisme siber.

d. Keamanan Maritim (Maritime Security)

Patroli yang terkoordinasi dan kunjungan kapal ke pelabuhan-pelabuhan negara lain penting untuk menunjukkan solidaritas dan kekuatan, namun perlu ada latihan kontra terorisme praktis yang dilakukan oleh kedua Angkatan Laut di laut teritorial kedua negara. Latihan-latihan ini harus melibatkan objek nasional yang vital dari setiap negara.

Untuk patroli terkoordinasi dan gabungan, patroli ini harus dijalankan bersama bukan di perairan sendiri. Ini langkah yang penuh resiko jadi harus memastikan bahwa Nota Kesepahaman dan Operasi Prosedur Standar yang lengkap dilaksanakan.

Selain ini beberapa program dirancang untuk interoperabilitas diantara personil dari kedua Angkatan Laut sangat penting. Kursus Bahasa dipertimbangkan sangat berguna karena artinya bahwa kru dari dua pihak akan berkomunikasi dengan mudah, dan selain komunikasi semua peserta akan belajar kebudayaan dari pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Format Oxford telah digunakan dengan benar dan konsisten untuk referensi dalam Taskap ini.

Buku

Alexander, Yonah, dan Dean Alexander, *The Islamic State Combating the Caliphate Without Borders*. London: Lexington Books, 2015.

Costas M. Constantinou and Paul Sharp, "Theroretical Perspectives in Diplomacy", published online by [researchgate.net/profile/Costas_Constantinou5, p24, akses April 2020]

Jackson, R, and Murphy, E, and Poynting, S, "Contemporary State Terrorism: Theory and Practice", published by Routledge, Taylor and Francis Group, London, p1.

Lauland, Andrew/Moroney, Jennifer/Rivers, John/Bellasio, Jacopo dan Cameron, Kate. *Countering Violent Extremism in Australia and Abroad*, published by the RAND Corporation, 2019, hal xi

Leonard, A, Research Assistant for the department of politics and social change, Centre for Strategic and International studies (CSIS), "Repatriation to avoid worse problems", *The Jakarta Post*, Friday February 28 2020.

Stern, Jessica dan J.M. Berger. *ISIS The state of Terror*, London: William Collins, 2015.

Ritchie, H, Hasell, J, Appel, C and Roser, M: *Terrorism*, November 2019, Published online at OurWorldInData.org, dari: [<https://ourworldindata.org/terrorism>, akses 28 April 2020]

Kutipan Dari Sumber

Dutton, P, Statement by Australian Home Affairs Minister,

[<https://theconversation.com/why-australia-can-no-longer-avoid-responsibility-for-its-citizens-held-in-syria-127439>, akses 8 Mei 2020]

Marsudi, R, Menteri Luar Negeri Indonesia, di ceramah ke peserta di Lemhannas, 12 Mar 2020.

Ma'ruf, A, Wakil Pesident Indonesia, sesudah pertemuan di Bogor, Artikel *Jakarta Post*, tanggal 12 Feb 2010, hal 2.

Morrison, S, Pengucapan dari Kantor Perdana Menteri Australia, 11 Feb 2020, [pm.gov.au/media/joint-statement-0, akses 3 April 2020]

Nizam, Prof, Ceramah ke peserta Lemhannas berjudul Strategi Pendidikan Untuk Mendukung Pembangunan Nasional pada tgl 29 April 2020.

Owen, R, Commander Task Group IPE 2019, diterbitkan online di Navy News, 31May 2019,
[https://news.navy.gov.au/en/May2019/IPE19/5243/Smiles-the-key-to-a-successful-IPE19.htm#.XqpqEJP7T_Q, akses 13 Mei 2020]

Payne, M, Statement by the Australian Foreign Minister, as published on the DFAT website [<https://www.dfat.gov.au/international-relations>, akses April 2020]

Witular, R, Jokowi launches maritime doctrine ot the world, The Jakarta Post, 13 Nov 2014, diakses 27 April 2020

Naskah / Laporan

Admin TNI Mil, 30 Jul 2019, [Tni.mil.id/view-156121-panglima-tni-resmikan-satuan-koopssus-tni.html, diakses 4 Mei 2020]

Australian Counter-Terrorism Laws, Questions and and Answers, hal 3, [Ag.gov.au/NationalSecurity/CounterterrorismLaw/Documents/Australias%20conter%20terrorism%20laws.pdf, diakses 26 April 2020]

Australia's Counter-Terrorism Strategy Our Resilience, 2015
[<https://www.nationalsecurity.gov.au/Media-and-publications/Publications/Documents/Australias-Counter-Terrorism-Strategy-2015.pdf> , diakses 19 April 2020]

Australian Defence white Paper 2016, Australian Ministry of Defence,
[<https://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-Defence-White-Paper.pdf>, akses 8 April 2020]

Australian National Security Agency, Jemaah Islamiyah,
[nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/Jemaahislamiya hJI.aspx, diakses 4 Mei 2020]

Badan Siber dan Sandi Negara, Hal "Fungsi", [<https://bssn.go.id/strategi-keamanan-siber-nasional/>, diakses April 2020]

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, Kementerian Pertahanan, November 2015, p. 34.[<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf>, akses 26 April 2020]

Countering terrorism, Hal 4,
[<https://www.afp.gov.au/sites/default/files/PDF/countering-terrorism.pdf>,
diakses 5 Mei 2020]

Department of Home Affairs, Fighting Terrorism Overseas, International
Cooperation, [[https://www.afp.gov.au/sites/default/files/PDF/countering-
terrorism.pdf](https://www.afp.gov.au/sites/default/files/PDF/countering-terrorism.pdf)], diakses 30 April 2020]

Siber Affairs, 31 Aug 2018, [[https://www.dfat.gov.au/international-
relations/themes/siber-affairs/Pages/mou-indonesia-australia-siber-
cooperation](https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/siber-affairs/Pages/mou-indonesia-australia-siber-cooperation)], diakses 12 Mei 2020]

Defence Cooperation South Pacific,
[[nautilus.org/publications/books/Australian-forces-abroad/pacific-
islands/defence-cooperation-program-south-pacific/](http://nautilus.org/publications/books/Australian-forces-abroad/pacific-islands/defence-cooperation-program-south-pacific/)], diakses 4 Mei 2020]

Indonesian – Australia Joint Comprehensive Strategic Partnership, 31
August 2018, [[https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-
declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-
commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia](https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia)], diakses 13 April
2020]

Innaugural Sub-Regional Defence Ministers Meeting on Counter Terrorism,
1 Februari 2018, [[https://www.defence.gov.au/annualreports/17-
18/Features/RegionalMtg.asp](https://www.defence.gov.au/annualreports/17-18/Features/RegionalMtg.asp)], diakses 30 April 2020, diakses 5 Mei 2020]

Intergovernmental Agreement on Australia's National Counter Terrorism
Arrangements, Oktober 2017,
[[https://www.coag.gov.au/sites/default/files/agreements/iga-counter-
terrorism.pdf](https://www.coag.gov.au/sites/default/files/agreements/iga-counter-terrorism.pdf)], diakses 18 April 2020]

Joint Declaration Maritime Cooperation, Oktober 2017, Article 10 in
Australia-Indonesia – [[https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-
indonesia-joint-declaration-maritime-cooperation.pdf](https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-indonesia-joint-declaration-maritime-cooperation.pdf)] accessed, akses 7
April 2020]

Joint Understanding on Security, Augustus 2014,
[[https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-
republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-
cooperation](https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation)], diakses 25 April 2020]

Lombok Treaty 2006, 12 Juni
2006, [[https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-
the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-
cooperation](https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation) Article 2], akses 8 April 2020]

Parliamentary Business Committees Senate Economics Corporate Tax Report, Offshore Oil and Gas, Chapter 5.1,
[\[https://www.aph.gov.au/Parliamentary%20Business/Committees/Senate/Economics/Corporatetax45th/Report/c05\]](https://www.aph.gov.au/Parliamentary%20Business/Committees/Senate/Economics/Corporatetax45th/Report/c05), diakses 12 Mei 2020

Stepping-Up Australia's engagement with our Pacific family, 16 September 2019, [Dfat.gov.au/geo/pacific/engagement/pages/stepping-up-australias-pacific-engagement, diakses 26 April 2020]

The White House International Strategy for Siberspace, Prosperity, Security and Openness in a Networked World, Hal 14, diterbit online di
https://media.defense.gov/2017/May/11/2001745613/-1/-1/0/CPP_0001_YANNAKOGEOGOS_SIBER_TTRIBUTION_CHALLENGE.PDF, diakses 25 Mei 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 2018,
[Sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175528/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf, diakses 16 April 2020]

UN Convention of Statelessness, The 1954 Convention,
[\[https://www.unhcr.org/en-au/un-conventions-on-statelessness.html\]](https://www.unhcr.org/en-au/un-conventions-on-statelessness.html), diakses 7 Mei 2020]

Jurnal / Artikel

ASEAN Today: Economics and AEC 2015, [businessinasean.com/en/doing-business-in-asean/looking-beyond-asean/asean-and-Cina/the-Cina-connection-for-asean.htrr, diakses 29 April 2020]

Butt, Simon, Anti Terrorism Law and Criminal Process in Indonesia, Hal 2, [Law.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0010/1546327/AntiTerrorismLawandprocessinIndonesia2.pdf, diakses 25 April 2020]

Chan, Frances, ISIS Militants Nabbed in Indonesia for election terror plot, 17 May 2019, [\[https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-arrests-dozens-of-terror-suspects-ahead-of-poll-results\]](https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-arrests-dozens-of-terror-suspects-ahead-of-poll-results), diakses 6 Mei 2020]

Delvia, Afridana Putri, Pentingnya Pengaktualisasian Wawasan Nusantara Dalam Membangun Ketahanan Nasional, 14 April 2010, [\[https://delviadelvi.wordpress.com/2010/04/14/pentingnya-pengaktualisasian-wawasan-nusantara-dalam-membangun-ketahanan-nasional/\]](https://delviadelvi.wordpress.com/2010/04/14/pentingnya-pengaktualisasian-wawasan-nusantara-dalam-membangun-ketahanan-nasional/), diakses 3 Mei 2020]

Harris, Rob, Intelligence Agencies Pinned Parliament Hack on Beijing: Report, 16 Septmeber 2019,
[\[https://www.smh.com.au/politics/federal/intelligence-agencies-pinned-parliament-hack-on-beijing-report-20190916-p52rou.html\]](https://www.smh.com.au/politics/federal/intelligence-agencies-pinned-parliament-hack-on-beijing-report-20190916-p52rou.html), diakses 11 May 2020]

Indonesia passes controversial anti-terror laws to fight ISIS, 26 May 2018, [Aljazeera.com/news/2018/05/Indonesia-passes-controversial-anti-terror-laws-fight-isil-180525055635674.html, diakses 14 April 2020]

Lagan, Bernard, Fears Over Pacific Debt Colonies as Tonga Struggles to repay China, 16 Aug 2018, [thetimes.co.uk/article/Australia-fears-chinese-influence-in-pacific-as-tonga-admits-debt-distress—mxzc9j9fr, diakses 29 April 2020]

Mahfud, M. Menkopolhukam, Indonesia Refuses to let ISIS Fighters and their Families to Return Home, 11 Februari 2020, [<https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-refuses-to-let-isis-fighters-and-their-families-to-return-home>, diakses 23 April 2020]

Paath, Carlos, Gov't has Taken Concrete Steps to Counter High Tech Threats, Security Minister Says, 27 Oktober 2018, [<https://jakartaglobe.id/news/govt-has-taken-concrete-steps-to-counter-high-tech-threats-chief-security-minister-says/>], diakses 7 Mei 2020]

Prashanth Parameswaran, Joint Understanding on Security, Februari 2018, [<https://thediplomat.com/2018/02/whats-in-the-new-australia-indonesia-military-pact/>], akses 9 April 2020]

Singh, Anoop, Finance and Development, June 2010, Volume 47, Number 2, International Monetary Fund, [imf.org/external/pubs/ft/fand/2010/06/singh.htm, diakses 29 April 2020]

Storey, Henry, Is Australia Taking the Threat of right Wing Terrorism Seriously, 10 April 2020, [TheDiplomat.com/2020/04/is-australia-taking-the-threat-of-right-wing-terrorism-seriously/, diakses 4 Mei 2020]

Siburan, Hinsu, Pengantar Strategi Keamanan siber di Indonesia, 2018, [<https://bssn.go.id/tugas-dan-fungsi-bssn/>], diakses 10 Mei 2020]

Tangguh Chairil, Sibersecurity for Indonesia: what needs to be done? 9 Mei 2019, [<https://theconversation.com/sibersecurity-for-indonesia-what-needs-to-be-done-114009>], diakses 10 Mei 2020]

Situs Internet:

Australian Government, Attorney General's Department, <https://www.attorneygeneral.gov.au/>

Australian Government, Department of Defence, <https://www.defence.gov.au/>

Australian Government, Department of Home Affairs, <https://www.homeaffairs.gov.au/>

Battle of Marawi, [https://en.wikipedia.org/wiki/Marawi_crisis, diakses 3 Mei 2020]

Household use of Information Technology, Australia 2016-2017, 2017, [<https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/8146.0>, diakses 10 Mei 2020]

Australia and Indonesia Unite to Improve Maritime Security, 1 May 2018, [https://news.navy.gov.au/en/May2018/Fleet/4591/Australia-and-Indonesia-unite-to-improve-maritime-security.htm#.XqpvgJP7T_Q, diakses 13 Mei 2020].

Menuju Poros Maritim Dunia, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata, diakses 12 May 2020]

Presiden Jokowi Suarakan RI Sebagai Poros Maritim Dunia di Sidang IMO, 20 April 2016, [<https://news.detik.com/berita/d-3191949/presiden-jokowi-suarakan-ri-sebagai-poros-maritim-dunia-di-sidang-imo>, diakses 11 May 2020]

Indian Ocean Naval Symposium, RAN Publications, 2018, [<https://www.navy.gov.au/ions>, diakses 2 Mei 2020]

The Honeynet Project, The Organisation, 1999, [<https://www.honeynet.org/about/>, diakses 11 Mei 2020]

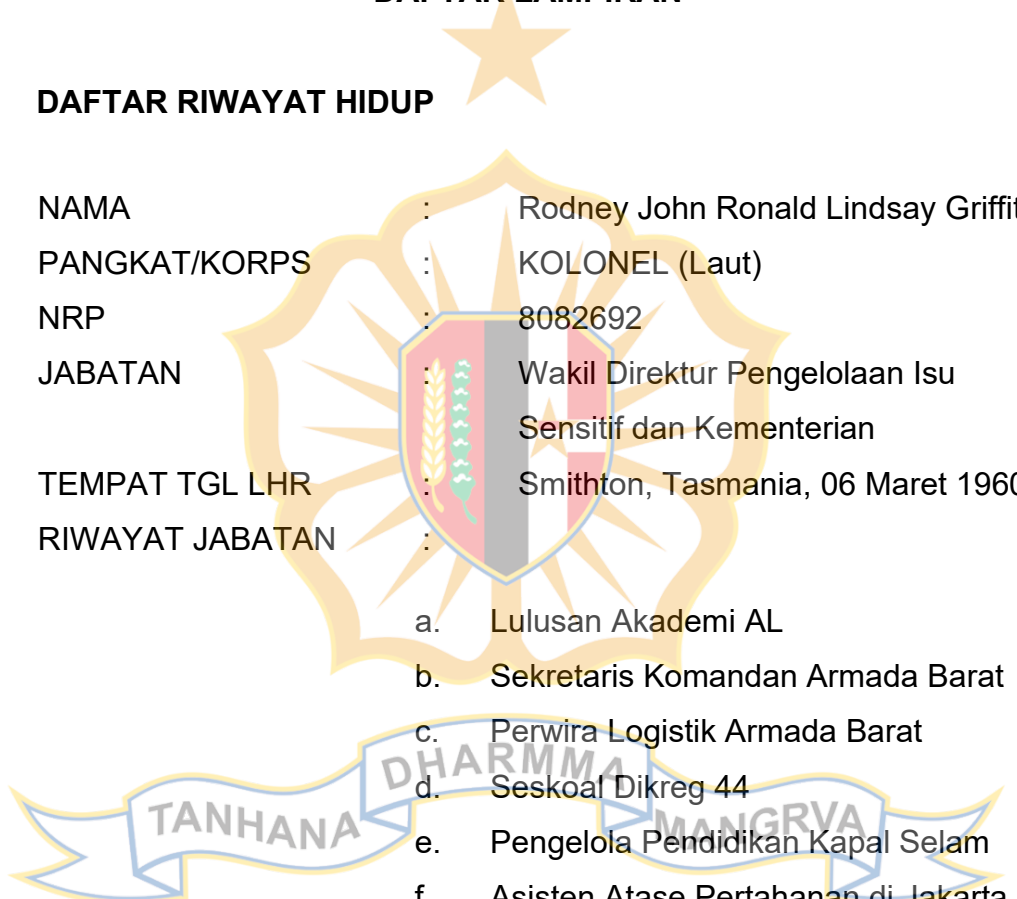
White Paper, April 2020, [[En.wikipedia.org/wiki/White_paper](https://en.wikipedia.org/wiki/White_paper), akses 5 April 2020]

Terrorism in Australia, [[En.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Australia](https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Australia) diakses 29 April 2020]



DAFTAR LAMPIRAN

1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 
1. NAMA : Rodney John Ronald Lindsay Griffiths
 2. PANGKAT/KORPS : KOLONEL (Laut)
 3. NRP : 8082692
 4. JABATAN : Wakil Direktur Pengelolaan Isu Sensitif dan Kementerian
 5. TEMPAT TGL LHR : Smithton, Tasmania, 06 Maret 1960
 6. RIWAYAT JABATAN :
 - a. Lulusan Akademi AL
 - b. Sekretaris Komandan Armada Barat
 - c. Perwira Logistik Armada Barat
 - d. Seskoal Dikreg 44
 - e. Pengelola Pendidikan Kapal Selam
 - f. Asisten Atase Pertahanan di Jakarta
 - g. Sesko TNI Dikreg 40
 - h. Pengelola Logistik di Afghanistan JTF633
 - i. Dosen Seskoal
 - j. Wakil Direktur Isu Sensitif dan Kementerian
 7. RIWAYAT PENDIDIKAN :
 - a. Dikum.

| | | | |
|----|-----|----|------|
| 1) | SD | TH | 1972 |
| 2) | SMP | TH | 1975 |

| | | | |
|----|-----|----|------|
| 3) | SMA | TH | 1983 |
| 4) | S-1 | TH | 2003 |

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

2. LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari:

Nama: Rodney John Ronald Lindsay Griffiths CSM, RAN, BA
(Kajian Asia) BEd

Peserta: Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX
tahun 2020

Judul Taskap: Menanggulangi Berkembangnya Terrorisme di Indonesia dan
Australia melalui kerjasama antara dua Negara.

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/Tidak Sesuai dengan
Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI nomor 01 tahun 2020,
karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk di uji.



Mayjen TNI Rahmat Pribadi

3. ALUR PIKIR



MENANGGULANGI BERKEMBANNYA TERORISME DI INDONESIA DAN AUSTRALIA MELALUI KERJASAMA ANTARA DUA NEGARA

